

PENGARUH STRUKTUR PELUANG POLITIK TERHADAP GERAKAN

***ENCAMPMENT* PADA TAHUN 2024-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RIZAL KHAEFI

20323041

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PENGARUH STRUKTUR PELUANG POLITIK TERHADAP GERAKAN
ENCAMPMENT PADA TAHUN 2024-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RIZAL KHAEFI

20323041

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH STRUKTUR PELUANG POLITIK TERHADAP
GERAKAN ENCAMPMENT PADA TAHUN 2024-2025**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the three members of the Exam Board listed on the left.

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Juni 2026



Rizal Khaefi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	5
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	10
1.8 Metode Penelitian.....	11
1.8.1 Jenis Penelitian	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	11
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	11
1.8.4 Proses Penelitian.....	12
1.9 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB 2 DINAMIKA GERAKAN <i>ENCAMPMENT</i> PALESTINA DAN TEKANAN KEBIJAKAN LOBI AMERIKA SERIKAT	14
2.1 Dinamika Gerakan <i>Encampment</i> Palestina	14
2.2 Tekanan Kebijakan dan Pengaruh Lobi Amerika Serikat	21
BAB 3 STRUKTUR PELUANG POLITIK DALAM GERAKAN <i>ENCAMPMENT</i> DI AMERIKA SERIKAT	27
3.1 <i>Openness of Political Institutions</i> (Keterbukaan Sistem Politik Amerika Serikat).....	27
3.2 <i>Elite Divisions</i> (Perpecahan Elit dalam Sistem Politik Amerika Serikat)	32
3.3 <i>Presence of Allies</i> (Kehadiran Sekutu Berpengaruh Sistem Politik Amerika Serikat).....	41

3.4	<i>State Capacity of Repression</i> (Kapasitas Represi Negara Amerika Serikat)	43
BAB 4 PENUTUP		47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA		49

DAFTAR SINGKATAN

POS : *Political Opportunities Structure*

USA : *United States of America*

UNESCO : *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

AAUP : *American Association of University Professors*

ICC : *International Criminal Court*

ICJ : *The International Court of Justice*

PBB : *Perserikatan Bangsa-Bangsa*

AIPAC : *American Israel Public Affairs Committee*

JVP : *Jewish Voice for Peace*

UCLA : *University of California, Los Angeles*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkemahan Pro-Palestina (<i>Encampments</i>) di Universitas Amerika Serikat... ..	17
Gambar 2.2 Aksi penangkapan 3,100 partisipan dalam demonstrasi pro-Palestina... ..	19
Gambar 3.1 Faksi Moderat Amerika Serikat... ..	35
Gambar 3.2 Faksi Progresif Amerika Serikat... ..	36
Gambar 3.3 Rashida Tlaib Memperkenalkan Resolusi Untuk Genosida Israel.....	39

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang gerakan *encampment* yang dilakukan atas keresahan narasi ketidakadilan dalam peristiwa Genosida Israel-Palestina dan dilakukan oleh mahasiswa berbagai universitas di Amerika Serikat selama tahun 2024-2025. Dengan menggunakan konsep *Political Opportunities Structure* dari Doug McAdam, penulis membedah rumusan masalah melalui empat variabel yaitu *Openness of Political Institutions*, *Elite Divisions*, *Presence of Allies* dan *State Capacity of Repression*. Argumen utama dari penelitian ini adalah Amerika Serikat dalam menanggapi gerakan *encampment* memiliki sebuah struktur peluang politik yang tertutup rapat atau *fully closed political structure* meski secara konstitusi negara bersifat terbuka. Hal ini kemudian diperkuat oleh adanya faktor kepentingan luar negeri yang beraliansi penuh bersama Israel. Meski ditemukan banyak faktor pendukung untuk keberhasilan gerakan *encampment*, tapi belum mampu mengubah arah kebijakan negara Amerika Serikat dalam menanggapi peristiwa genosida Israel-Palestina. Penulisan ini menyimpulkan bahwa gerakan mahasiswa *encampment* akan terus terisolasi sebagai aktor luar yang ruang geraknya dibatasi.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Gerakan Sosial, *Encampment*, Genosida, Israel Palestina

ABSTRACT

This study discusses the encampment movement, which emerged from concerns regarding the narrative of injustice in the Israel-Palestine Genocide and was carried out by university students across the United States throughout 2024–2025. Utilizing Doug McAdam’s Political Opportunity Structure concept, the author analyzes the research problem through four variables: the Openness of Political Institutions, Elite Divisions, the Presence of Allies, and the State Capacity for Repression. The primary argument of this research is that the United States, in responding to the encampment movement, exhibits a fully closed political opportunity structure despite being constitutionally open. This condition is further reinforced by foreign policy interests that align fully with Israel. Although numerous supporting factors for the success of the encampment movement were identified, they have not yet been able to alter the direction of US foreign policy regarding the Israel-Palestine genocide. This study concludes that the student encampment movement will remain isolated as an external actor whose room for maneuver is restricted.

Keyword: United States, Social Movement, *Encampment*, Genocide, Israel Palestine

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan mahasiswa telah menjadi suatu *trend* yang populer khususnya di era teknologi dan globalisasi, hal tersebut memicu adanya pergerakan kecepatan perputaran informasi yang merata pada lapisan masyarakat. Tak heran sebab mahasiswa mempunyai peran penting karena kepekaan mereka terhadap situasi politik berjalan secara responsif. Selain itu, sebagian besar gerakan mahasiswa ditujukan kepada aparat pemerintah baik secara sipil hingga militer dan berasal dari perguruan tinggi yang memiliki *track record* solid terhadap kepekaan situasi politik. Darmawan menyatakan bahwa mahasiswa dijuluki sebagai *agent of modernization*, *agent of development* dan *agent of change* (Matulessy and Ancok 1997, 90) mengingat gerakan ini bukan hanya memperjuangkan masalah politik tetapi juga persoalan dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat terutama kalangan minoritas atau terpinggirkan (Matulessy and Ancok 1997, 89–90). Salah satu partisipasi politik secara nyata adalah gerakan *encampment* yang dilakukan oleh mahasiswa melalui institusi perguruan tinggi di wilayah Amerika Serikat.

Seperti yang kita ketahui bahwa genosida Israel-Palestina berakar dari adanya perbedaan politik, ekonomi, agama hingga budaya yang bertabrakan dalam sebuah wilayah yang dianggap suci oleh banyak pihak dan telah berlangsung selama beberapa dekade (Fadya et al. 2024, 900). Eskalasi genosida di Palestina sejak Oktober 2023 telah memicu krisis kemanusiaan yang ditandai dengan kehancuran infrastruktur sipil seperti universitas dan rumah sakit (Fadya et al. 2024, 900), tak luput dari sasaran. Genosida yang bukan hanya memakan banyak korban jiwa namun juga menggerakkan hati nurani manusia. Salah satu fenomena yang menyayat hati adalah

peristiwa yang dialami oleh gadis kecil bernama Hind Rajab yang tersambung melalui operator Bulan Sabit Merah Palestina tatkala dirinya ditembaki sebanyak hampir 335 peluru dalam sebuah mobil (Cordall 2025), semakin diketahui oleh banyak pihak tatkala kasusnya diangkat ke sebuah medium film berjudul *“The Voice of Hind Rajab”* (2025) oleh Kaouther Ben Hania dan memenangkan banyak penghargaan di berbagai festival film bergengsi dunia (Glynn 2025). Mengacu pada data tersebut dan banyaknya aspek menggetarkan yang melatarbelakangi dinamika genosida membuat adanya berbagai gerakan sosial yang terjadi secara global. Adanya faktor kepentingan yang tumpang tindih dan menemui jalan buntu membuat kalangan mahasiswa di Amerika Serikat melalui institusi perguruan tinggi salah satunya seperti Universitas *Columbia*, *Yale*, *Harvard* dan *Massachusetts Institute of Technology* hingga *Stanford* bergabung menjadi satu aliansi utuh untuk mendukung keberpihakan mereka terhadap Palestina (Carliner 2025).

Gerakan keberpihakan terhadap Pro-Palestina dimulai dengan melakukan aksi duduk secara bersama yang disebut taktik *Sit-in* sebagai bentuk perlawanan sipil tanpa kekerasan (Hohenstein 2025) dengan level lanjutan berupa mendirikan sebuah perkemahan bernama *encampment* dengan para mahasiswa membawa tenda, kasur lipat dan peralatan medis hingga logistik makanan (Feigenbaum 2024) yang menciptakan sebuah kehadiran yang permanen dan sulit diabaikan oleh pihak luar yang melihatnya (Drenon et al. 2025). Terdapat beberapa tuntutan utama yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa seperti narasi ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Palestina yang berkontribusi lebih dalam terhadap tuntutan lanjutan seperti transparansi dalam hal finansial dari pihak universitas melalui aset dan investasi yang terafiliasi dengan pihak Israel hingga pemutusan hubungan kerja sama pada bidang akademik seperti pertukaran pelajar dan riset (Patnistik 2024). Tak lupa, tuntutan terhadap perlindungan hukum

bagi para aktivis yang terlibat juga menjadi poin krusial mengingat adanya tindakan skorsing dan pemecatan yang dilakukan seiring berjalannya gerakan *encampment*.

Gerakan yang pertama kali dimulai oleh puluhan ribu mahasiswa di Universitas Columbia pada tanggal 17 April 2024 ini berlangsung secara pasif (Staff 2025) meskipun beberapa demonstrasi mengalami eskalasi konflik yang melibatkan konfrontasi fisik dengan aparat penegak hukum (Staff 2025). Tindakan tersebut justru memicu adanya tindakan represif aparat serta penahanan administratif terhadap lebih dari 3000 partisipan yang terlibat (Staff 2025), mencerminkan ketegangan antara hak kebebasan berpendapat dan stabilitas institusional sebelum menyebar ke seluruh wilayah Amerika Serikat dan tingkat global. Melihat bagaimana respon global terhadap awal mula gerakan di Universitas Columbia justru memicu efek domino yang melahirkan solidaritas di berbagai belahan dunia. Fenomena ini memperkuat posisi mahasiswa sebagai aktor non-negara yang mampu menggeser perspektif publik tentang isu kemanusiaan di Palestina.

Amerika Serikat secara global dikenal sebagai salah satu negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat dan penegakan hukum (Nasir Badu 2015, 11) sebagai nilai fundamental negara. Hal tersebut dijamin secara konstitusional melalui Amandemen Pertama (Britannica 2026) yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi politik. Sayangnya visi tersebut harus mengalami kontradiksi ketika gelombang protes mahasiswa melalui gerakan *encampment* pro-Palestina meluas di berbagai universitas di Amerika Serikat. Gerakan yang berisi tuntutan ini justru direspons oleh negara sebagai tindakan represif. Sama halnya dengan respon institusi yang cenderung merespons dengan pendekatan “*sekuritisasi*”, sebuah istilah dalam ilmu politik dan studi keamanan yang berarti sebuah proses dalam menghadapi isu sosial biasa yang kemudian diberikan dengan

ancaman keamanan bagi pihak yang terlibat (Pradnyana 2023). Adanya respons defensif ini juga memicu perdebatan mengenai batas kebebasan akademik di tengah tekanan politik serta tuntutan sipil yang terus muncul ke permukaan.

Melihat peluang tersebut membuat gerakan *encampment* dapat diteliti menggunakan konsep *Political Opportunities Structure (POS)* dari Doug McAdam sebagai suatu upaya efektif dalam menyeimbangkan perspektif terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam skala global. Dalam prinsip hubungan internasional, *POS* menekankan pada kemunculan sebuah peluang yang dapat mendorong atau menghambat dari terjadinya gerakan sosial. Dengan kata lain, menguji seberapa besar efektivitas tindakan yang dilakukan oleh suatu aliansi atau kelompok untuk dapat menciptakan perubahan dengan melibatkan partisipasi objek di dalamnya. Ada beberapa literatur yang membahas tentang Israel-Palestina dan *social movement* dalam ruang lingkup Amerika Serikat, antara lain “*Students United : Escalations of United States’ Campus Protests in Historical Perspective*” (van Daal 2025) dan “*Komparasi Narasi Gerakan Pro-Palestina dan Pro-Israel di Amerika Serikat Menggunakan Teori Framing*” (Mahayasa and Putri 2024) lalu “*Perceptions of Power: Assessing the Global Perception of the United States after the Ukraine and Gaza Crisis*” (Bora 2024) hingga “*Ham di Tengah Peluru : Meninjau Pergerakan Hukum Internasional Dalam Konflik Israel - Palestina*” (Victoria Daniel and Br Sitepu 2025). Namun belum ada literatur yang membahas kedua variabel tersebut menjadi satu penelitian yang utuh dengan menggunakan konsep studi kajian hubungan internasional serta menyesuaikan pada situasi akademik saat ini. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh struktur peluang politik terhadap gerakan *encampment* pada tahun 2024-2025.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh struktur peluang politik terhadap gerakan *encampment* pada tahun 2024-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Political Opportunities Structure (POS)* terhadap gerakan *encampment* pada 2024-2025.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada pengaruh *Political Opportunities Structure (POS)* terhadap gerakan *encampment* oleh mahasiswa di Amerika Serikat. Selain itu, penulis memfokuskan tahun penelitian pada 2024-2025 ketika peristiwa tersebut sedang terjadi serta pemahaman terdapat dinamika *social movement* dan eksplorasi terhadap genosida Israel-Palestina. Oleh karena itu, kajian gerakan sosial dalam studi hubungan internasional mempunyai konsep yang dirasa oleh penulis sebagai hal yang tepat untuk diteliti lebih detail bersama klasifikasi variabel yang dipilih.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai gerakan sosial mahasiswa terhadap genosida Israel-Palestina dan *Political Opportunities Structure* belum diteliti secara bersamaan dalam semua jenis literatur yang terdaftar. Namun apabila dikemas dalam satu variabel, topik seputar gerakan sosial

mahasiswa Israel-Palestina hingga konsep *Political Opportunities Structure* mudah ditemukan dalam bentuk penelitian dan fokus yang berbeda. Dias Pabyantara bersama Anggi dalam artikel berjudul “*Komparasi Narasi Gerakan Pro-Palestina dan Pro-Israel di Amerika Serikat Menggunakan Teori Framing*” menekankan pada pengenalan analisis *framing* untuk membingkai sebuah peristiwa serta narasi gerakan Pro-Palestina di Amerika Serikat. Menarik melihat penelitian ini menyimpulkan dua narasi berbeda (Pro-Palestina dan Pro-Israel) yang mereka ambil dalam platform X dengan melibatkan tokoh ternama, Joe Biden dalam skema perpolitikan Amerika Serikat (Mahayasa and Putri 2024) dijelaskan secara runtut dan detail, dengan diberikannya contoh konten yang selaras dengan pembahasan yang diangkat. Namun dalam literatur ini hanya menganalisa aktivitas *offline* melalui *platform X* (Mahayasa and Putri 2024) saja tanpa melibatkan platform media sosial lainnya sehingga pemahaman gerakan sosial belum dapat dimaksimalkan dengan baik.

Berbeda dengan Pabyantara, literatur artikel kali ini membahas seputar genosida Israel-Palestina melalui perspektif hukum internasional. Artikel tersebut ditulis oleh Elsha Victoria Daniel bersama Gabriela Priscila Br Sitepu dan berjudul “*Ham di Tengah Peluru : Meninjau Pergerakan Hukum Internasional Dalam Konflik Israel - Palestina*”. Artikel ini menjelaskan tentang hukum humaniter internasional yang diterapkan pada tatanan global dalam peristiwa genosida Israel-Palestina. Terdapat poin menarik seputar keterlibatan lembaga yang komprehensif, mekanisme penegakan hukum hingga penyelidikan serta keadilan dalam skema penjajahan bersenjata (Victoria Daniel and Br Sitepu 2025). Meski ditampilkan secara sistematis, lugas, dan terperinci sayangnya literatur ini kurang solid dalam membahas sub-bab mekanisme penegakan hukum internasional oleh *International Criminal Court* (ICC) meski diperkaya oleh banyaknya data. Dibalik hal tersebut, masih terdapat poin-poin penting yang dapat memperkaya

data bagi penulis untuk penelitian ini mengingat persamaan konteks terhadap genosida Israel-Palestina sesuai dengan penelitian yang diangkat.

Selanjutnya persepsi masyarakat Amerika Serikat terhadap kekuatan pengaruh politik pada isu kemanusiaan dirasa perlu untuk dibahas seperti yang dituliskan oleh artikel *“Perceptions of Power: Assessing the Global Perception of the United States after the Ukraine and Gaza Crisis”* serta ditulis oleh Aman Bora. Pada artikel ini dijelaskan bahwa Amerika Serikat masih memegang posisi sebagai satu-satunya *superpower* dengan jangkauan global yang luas, krisis yang terjadi dianggap telah merusak reputasi Amerika Serikat (Bora 2024) sebagai penegak demokrasi dan hak asasi manusia. Penelitian ini menarik bagi penulis karena dapat memperkaya data tentang bagaimana karakteristik negara dan masyarakat Amerika Serikat terhadap isu kemanusiaan seringkali mempunyai ciri khas sesuai dengan prinsip dan realitas politik yang ada.

Dari semua literatur di atas, artikel yang ditulis oleh Jiska Van Daal dan berjudul *“Students United : Escalations of United States’ Campus Protests in Historical Perspective”* merupakan tulisan yang paling menyerupai dengan isu penulis, namun memiliki perbedaan perspektif untuk penulisan. Tulisan tersebut menganalisis tentang pendekatan studi kasus komparatif terhadap empat universitas di Amerika Serikat melalui peristiwa era perang Vietnam dan era Pro-Palestina pada tahun 2024 dengan pendekatan konsep *Political Opportunity Structure* di beberapa sub-bab nya (van Daal 2024). Terdapat poin menarik seputar pemicu eskalasi, pengaruh politik identitas masing-masing pihak, respon institusional hingga konteks politik sesuai zamannya (van Daal 2024). Meski ditampilkan secara sistematis, lugas, dan terperinci sayangnya literatur ini tidak melibatkan data-data terbaru pada tahun 2025 khususnya yang berkaitan dengan sub-bab Pro-Palestina mengingat tahun penelitian tersebut dilaksanakan

pada tahun 2024. Dibalik hal tersebut, masih terdapat poin-poin penting yang dapat memperkaya data bagi penulis untuk penelitian ini mengingat konteks dari gerakan sosial mahasiswa di Amerika Serikat kurang lebih sama meskipun dengan tingkat periode waktu yang berbeda.

Masing-masing dari tulisan di atas mengenai karakteristik gerakan sosial mahasiswa di era globalisasi dan pendekatan konsep *Political Opportunities Structure* berkontribusi memberikan perspektif baru bagi penelitian penulis tentang pengaruh struktur peluang politik terhadap gerakan *encampment* mahasiswa di Amerika Serikat terkait isu genosida Israel Palestina.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan konsep dalam kajian hubungan internasional terkait gerakan sosial yaitu *Political Opportunities Structure* dari Doug McAdam. Dalam konsepsi McAdam yang tertuang dalam bukunya berjudul “*Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities*” menjelaskan tentang bagaimana gerakan sosial dapat muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat dengan berbagai klasifikasi melalui karakteristik masing-masing.. McAdam lebih dalam berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh tuntutan ketidakpuasan dan sumber daya yang dimiliki melalui respons terhadap suatu isu, melainkan juga bertumpu pada kondisi politik di dalamnya yang dapat memicu meningkatnya intensitas karena adanya peluang yang terbuka, sehingga dapat menimbulkan peluang bagi kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memberikan suaranya (Mc Adam dkk. 1996). Pada perkembangannya terdapat empat variabel yang tertulis pada buku McAdam tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. *Openness of Political Institutions* adalah sebuah prinsip politik dimana keterbukaan sistem politik dapat berkuasa mengizinkan partisipasi politik, hak sipil atau bahkan kebebasan tertentu bagi warga negara dan kelompok oposisi namun bisa juga bersifat tertutup tergantung bagaimana terjadinya sebuah peristiwa (Mc Adam dkk. 1996). Hal terpenting dalam poin ini adalah bahwa sistem benar-benar harus dirasakan oleh aktor politik sesuai dengan kepentingan dan wajib memiliki makna dalam pelaksanaannya.
2. *Elite Divisions* diartikan juga sebagai perpecahan elit adalah sebuah prinsip politik dimana kepentingan dilakukan oleh para pemimpin utama rezim yang berkuasa seperti pemimpin partai dan militer justru malah menimbulkan ketidakstabilan aliansi dan keretakan internal (Mc Adam dkk. 1996). Situasi tersebut kemudian membuka peluang aliansi antara faksi dan gerakan serta melemahkan kemampuan represi penguasa.
3. *Presence of Allies* adalah sebuah sistem politik yang menitikberatkan pada kekuatan dan kehadiran pendukung sekutu elit dalam membantu gerakan sosial. Hal ini berarti setiap kehadiran sekutu elit di dalam sistem politik dapat memberikan sumber daya dan perlindungan yang diperlukan bagi sebuah gerakan untuk mempertahankan mobilisasi dan keberhasilan gerakan (Mc Adam dkk. 1996).
4. *State Capacity of Repression* atau kapasitas represi negara adalah kemampuan sebuah negara untuk menggunakan kekerasan melalui aparat paksa seperti militer dan polisi serta dilakukan secara efektif untuk menekan adanya sebuah perbedaan pendapat, pemberontakan hingga unjuk rasa di tatanan masyarakat sehingga berpotensi dalam menghancurkan gerakan sosial (Mc Adam dkk. 1996).

Tentunya dari keempat variabel tersebut memiliki relevansi terhadap penelitian struktur peluang politik terhadap gerakan *encampment* yang dilakukan oleh mahasiswa di Amerika

Serikat. Variabel pertama akan menjelaskan tentang sejauh mana sebuah sistem yang dijalankan oleh lembaga formal dapat berpartisipasi secara terbuka sebagai aktor dalam gerakan sosial. Variabel kedua akan membahas potensi perpecahan di elit politik, hal tersebut dimaksudkan apakah dapat dimaksimalkan sebagai peluang atau justru malah melemahkan proses gerakan sosial. Variabel ketiga memiliki peluang bagi ketersediaan pihak-pihak yang mendukung terjadinya gerakan sosial. Variabel keempat sekaligus terakhir diharapkan memberikan ruang aman bagi gerakan sosial terhadap penurunan represi yang dilakukan oleh negara. Konsep ini akan digunakan untuk meneliti bagaimana seluruh hal tersebut mampu menjadi satu kesatuan utuh sebagai perspektif menarik dalam memandang sebuah isu di tatanan akademik.

1.7 Argumen Sementara

Political Opportunities Structure dari Doug McAdam membawa munculnya struktur peluang politik dalam gerakan *encampment* oleh mahasiswa Amerika Serikat yang berbentuk *Openness of Political Institutions*, ini menandakan bahwa Amerika Serikat memiliki hak kebebasan dalam berbicara serta dibantu dengan institusi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan peristiwa genosida Israel-Palestina. Sebaliknya bisa juga sebagai hambatan mengingat tuntutan terhadap Israel seringkali dilakukan secara tertutup dan pembatasan ketat terhadap bentuk protes lumrah terjadi dalam konteks gerakan sosial seperti ini. Selain itu, *Elite Divisions* membawa sekelompok elit di Amerika Serikat menyatakan dukungan serta memberikan legitimasi pada tuntutan mahasiswa atau justru malah memberikan tindakan represif karena tekanan politik yang semakin melebar sehingga berakhir sebagai perpecahan elit. Tindakan tersebut juga dibantu dengan kehadiran *Presence of Allies* yang menitikberatkan pada aktor yang mendukung gerakan tersebut misalnya sekelompok hak asasi

manusia yang cenderung terjun dalam konflik kemanusiaan dan berfokus pada aksi nyata. Terakhir terdapat *State Capacity of Repression* yang memberikan seberapa besar kemungkinan dan kemampuan negara termasuk otoritas kampus khususnya, untuk menekan gerakan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam terkait fenomena sosial yang kompleks (Risnita Asrulla 2024) yaitu gerakan *encampments* yang dilakukan oleh mahasiswa di Amerika Serikat melalui institusi pendidikan dengan menjadikan struktur peluang politik sebagai pembahasan utama. Dalam menganalisa data-data yang ditemukan, penulis akan menggunakan interpretasi data dengan formula “*what, why, and how*” dan fokus terhadap makna, proses (Risnita Asrulla 2024) serta interaksi yang membentuk peluang politik.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan *Political Opportunities Structure* sebagai subjek dan objeknya adalah gerakan *encampment* pada 2024-2025.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur yang berfokus pada pengolahan data sekunder berupa kajian literatur dalam bentuk buku seperti “*Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities*” (Mc Adam, D. McCarthy, et al. 1996) dan juga artikel penelitian yang merujuk pada *Doug McAdam Political Opportunity Structure student movement* dan *Genocide Israel-Palestine* serta beberapa artikel jurnal yang relevan. Selain itu, penulis juga membutuhkan artikel daring yang dirilis oleh media massa lokal

maupun internasional juga dibutuhkan dalam mendapat informasi yang aktual. Tak lupa, beragam laporan yang memuat data kredibel oleh lembaga terverifikasi seperti *Human Rights Watch*, *Amnesty International USA* hingga *American Association of University Professors (AAUP)*.

Dengan kata lain, instrumen dan teknik pengumpulan data bersumber dari pihak-pihak sebelumnya yang kemudian mampu diolah sehingga menjadikan status data berubah menjadi sekunder non-partisipatoris. Hal tersebut dilakukan agar memiliki tingkat relevansi dan akurasi tinggi sebagai sebuah penelitian serta mampu menyusun jawaban penulis atas rumusan masalah yang telah dibuat.

1.8.4 Proses Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur peluang politik terhadap gerakan *encampment* pada tahun 2024-2025, penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut antara lain menguraikan proses dan peluang dari konsep *Political Opportunities Structure*, mengidentifikasi pengaruh genosida Israel-Palestina dapat memicu gerakan sosial hingga perkembangan gerakan *encampment* di Amerika Serikat dapat menjadi siklus yang berkelanjutan seiring zaman. Setelah terkumpulnya data sekunder akan dilakukan analisis mendalam untuk menentukan solusi yang dapat sesuai dengan permasalahan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada proses penelitian kali ini, penulis akan menjelaskan karakteristik kasus secara detail melalui observasi dan pengumpulan data. Data-data yang akan diperoleh nantinya akan menguatkan penelitian sehingga mampu memberikan konklusi akhir bagi para pembaca melalui sistematika pembahasan yang terdiri dari Bab 1 hingga Bab 4.

Bab satu akan mencakup pendahuluan dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas dinamika gerakan *encampment* Palestina di lingkungan akademik dan respons kebijakan hingga tekanan lobi Amerika Serikat sebagai bagian dari struktur politik domestik.

Bab tiga akan memberikan analisis pemaparan masalah gerakan *encampment* dengan mengaplikasikan konsep *Political Opportunities Structure* dari Doug McAdam. Hal ini dilakukan secara argumentatif dengan dukungan data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Bab empat akan memuat kesimpulan yang berisi ringkasan dari hasil analisis dalam penelitian yang diangkat serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB 2

DINAMIKA GERAKAN *ENCAMPMENT* PALESTINA DAN TEKANAN KEBIJAKAN LOBI AMERIKA SERIKAT

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang gerakan *encampment* dalam peristiwa Genosida Palestina pada periode 2024-2025. Dalam kasus yang diangkat peneliti, gerakan *encampment* tersebut lahir sebagai sebuah respons terhadap sejarah pendudukan wilayah Palestina dengan melibatkan strategi gerakan dalam pandangan mahasiswa di Amerika Serikat. Mencapai fase tersebut, Amerika Serikat mulai menjalankan berbagai tekanan melalui kebijakan lobi untuk mencapai kepentingannya. Bab ini mengurai tentang kepentingan tersebut dengan melibatkan *American Israel Public Affairs Committee* hingga *donor revolt* sebagai wadah untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat sehingga terjadi dinamika munculnya struktur peluang politik dalam kajian hubungan internasional.

2.1 Dinamika Gerakan *Encampment* Palestina

Peristiwa Genosida Israel-Palestina pada periode 2024-2025 telah bertransformasi dari hanya sebuah krisis regional menjadi sebuah gerakan sosial bernama *encampment* yang dikenal luas secara global. Ada sebuah alasan mengapa peristiwa ini dikatakan sebagai sebuah genosida, bukan sekedar istilah politik melainkan sebuah pernyataan sikap yang merujuk pada otoritas hukum internasional. Narasi tersebut merupakan sebuah putusan *The International Court of Justice* (ICJ) yang dikeluarkan pada Januari 2024 dengan menyatakan bahwa “*terdapat risiko genosida yang masuk akal* (Nations 2024), disebut sebagai *plausible terhadap warga Palestina*”. Hal ini diperkuat oleh laporan pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bernama Francesca Albanese dalam sebuah dokumen berjudul “*Anatomy of Genocide*” (Council 2025)

yang membahas tentang serangan dan penghancuran sistematis terhadap fasilitas kesehatan, infrastruktur sipil hingga seluruh universitas di Gaza (Council 2025). Dalam konteks aktivisme mahasiswa, kehancuran institusi pendidikan menjadi sebuah poin penting yang menciptakan dilema moral (Council 2025), hal ini sering disebut sebagai *scholasticide* (Younes 2026) sehingga menimbulkan pandangan bahwa pendanaan sebuah universitas secara tidak langsung telah memfasilitasi krisis kelaparan dan hilangnya harapan hidup di Gaza (Younes 2026). Dengan demikian, rujukan data dari lembaga internasional tersebut berfungsi sebagai dasar legal untuk menuntut sebuah kebijakan.

Meskipun eskalasi yang terjadi pada tahun 2024 menjadi pemantik utama, gerakan *encampment* pada dasarnya merupakan sebuah bentuk respons terhadap sejarah pendudukan wilayah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Para aktivis mahasiswa melihatnya sebagai sebuah kelanjutan dari narasi ketidakadilan seperti yang disampaikan oleh Mahmoud Khalil dengan dialognya yang memberikan harapan yakni “*ingin membebaskan penindas dari kebencian dan rasa takut mereka*” (Khalil 2025) seakan membangun kesadaran kolektif mahasiswa untuk bergerak lebih jauh. Keterlibatan intelektual seringkali dilibatkan dalam gerakan ini yang berujung pada kesadaran melalui nilai kemanusiaan dan narasi sejarah hingga mencapai puncaknya melalui peran krusial teknologi informasi dan media sosial.

Dibandingkan dengan gerakan mahasiswa yang terjadi di Amerika Serikat sebelumnya dengan narasi media yang cenderung terbatas, aktivisme pada periode 2024-2025 bekerja melalui ekosistem digital memungkinkan terjadinya pergerakan narasi yang berkembang pesat secara instan. Munculnya dokumentasi dari warga sipil dan jurnalis lokal di Gaza melalui platform seperti *Instagram*, *Tiktok* hingga *X* (Castelnuovo 2025) dengan pengguna masifnya telah membuat adanya kedekatan jarak antara mahasiswa di Amerika Serikat dengan masyarakat di seluruh dunia. Peristiwa ini seperti sebuah potret yang membuat kekerasan dipandang sebagai

krisis kemanusiaan yang disaksikan secara *real-time* sehingga bertransformasi menjadi sebuah aksi politik yang nyata. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah konten politik bernama “*All Eyes on Rafah*” pada tahun 2024 dengan jumlah share lebih dari 47-50 juta kali dibagikan ulang (Davies 2024) melalui fitur *add yours* dalam waktu kurang dari 48 jam dibantu dorongan dari selebriti terkenal sebut saja Dua Lipa (Guardian 2024) dan Bella Hadid (Al Saadi 2024) melalui platform *Instagram*. Belum lagi dominasi narasi Pro-Palestina dengan Pro-Israel yang tercatat sekitar 109 miliar konten terkait narasi Palestina dibandingkan dengan 7 miliar konten terkait narasi Israel yang beredar secara global berdasarkan laporan dari *Northeastern Global News* (Moulton 2024).

Fenomena ini kemudian berkembang menjadi lebih dari aksi solidaritas melainkan sebuah bentuk kesadaran masyarakat dunia khususnya mahasiswa terhadap titik ketidakadilan di berbagai belahan dunia. Dalam pandangan mahasiswa di Amerika Serikat, genosida Palestina memiliki benang merah yang sama dengan perjuangan melawan rasisme sistemik dan kebijakan militer di negaranya. Hal tersebut menjadi alasan mengapa gerakan ini begitu cepat meluas secara global. Keadilan yang bersifat universal mampu membuat mahasiswa dari berbagai latar belakang identitas membuatnya mampu memperjuangkan hak warga di Gaza dan kemudian mulai mempertanyakan bagaimana respons dari institusi pendidikan serta negara yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui aksi *encampment* yang dilakukan oleh *Columbia University* kemudian menyebar dari satu benua ke benua lain, gerakan ini membuktikan bahwa batas negara bukan lagi penghalang bagi sebuah tuntutan moral dan mempertegas posisi dunia akademik sebagai garis depan perlawanan moral di tingkat internasional.

Gambar 2.1 Perkemahan Pro-Palestina (*Encampments*) di Universitas Amerika Serikat



Sumber : Reuters “*Pro-Palestinian Encampments at US universities*” (2024)

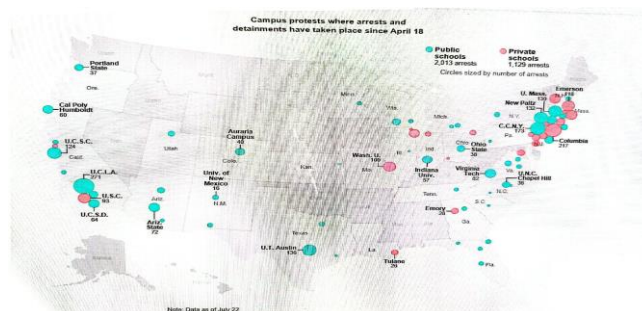
Peristiwa gerakan *encampment* terlihat pada gambar 2.1 menunjukkan aktivitas melarang gerakan mahasiswa pro-Palestina yakni pendirian tenda aktivis dan pendudukan gedung yang pertama kali terjadi di *Columbia University* pada tanggal 17 April 2024 (Reuters 2024b). Dalam prosesnya terdapat lima tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada otoritas kampus dan negara. Tuntutan pertama adalah narasi ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk Palestina sebagai korban genosida terhadap sejarah pendudukan wilayah (Patnistik 2024) , telah melanggar hak asasi manusia sehingga para aktivis melihatnya sebagai sebuah isu yang layak diperjuangkan secara global. Dari tuntutan pertama, kemudian muncul tuntutan kedua berupa penarikan modal secara finansial yang terlihat ketika mahasiswa mendesak pihak universitas untuk memutus semua rantai investasi dana dari korporasi serta perusahaan yang beraliansi dalam mendukung persenjataan bagi militer Israel (Patnistik 2024). Pada tahap ini, kemudian muncul sebuah *donor revolt* dimana investor mulai menarik investasi mereka. Agar agenda ini dapat berjalan secara objektif, para mahasiswa juga mengajukan tuntutan ketiga berupa transparansi finansial yang mewajibkan birokrasi universitas membuka laporan keuangan secara publik mengenai aset dan

investasi universitas telah dialokasikan kemana saja selama ini. Secara simultan, gerakan ini menyerukan tuntutan keempat berupa boikot akademik sebagai bentuk pemutusan hubungan moral, yang mencakup pemberhentian kerjasama riset, pembatalan program pertukaran pelajar hingga putusnya kerjasama yang bermitra dengan institusi asal Israel (Patnistik 2024). Menyadari besarnya risiko yang terjadi kemudian mencapai tuntutan kelima berupa perlindungan yang menyeluruh berupa sanksi dan catatan hukum pidana bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aksi perkemahan Pro-Palestina. Bersamaan dengan tuntutan tersebut, terdapat strategi yang dilakukan selama gerakan *encampment* yang bersifat non-kekerasan seperti mogok makan dan kuliah, melakukan petisi bersama alumni dan orang tua terkait penarikan donasi hingga memblokir wilayah gedung administrasi (Reuters 2024b). Tak lupa, memanfaatkan kemajuan teknologi dengan narasi melalui sosial media juga berkontribusi dalam penyebaran gerakan.

Perkembangan gerakan *encampment* terjadi selama periode 17 April - 1 Mei 2024 dengan berbagai kejadian seperti lebih dari 100 demonstran Pro-Palestina ditangkap di Columbia setelah presiden universitas Minouche Shafik, meminta polisi New York untuk membubarkan perkemahan tersebut (Reuters 2024b). Setelah itu, gerakan yang sama menyebar di *Yale University* hingga *New York University* dengan melibatkan Polisi anti huru hara yang dikerahkan terhadap para demonstran pro-Palestina, hal yang sama diberlakukan di *Texas University*, dengan 57 penangkapan atas tuduhan pelanggaran masuk tanpa izin. Pada masa itu, tingkat kekerasan yang hingga saat itu belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian terlihat di kampus-kampus lain (Reuters 2024b) dengan menggunakan penggunaan gas air mata dan peluru karet (VOA 2024). Hal itu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dari Ketua *House of Representatives United States*, Mike Johnson yang mengatakan universitas telah menjadi institusi yang tidak terkendali dan menyarankan pasukan cadangan militer negara dikerahkan untuk memulihkan ketertiban (Reuters

2024b). Oleh karena itu, jumlah penangkapan mengalami peningkatan pesat menjadi lebih dari 3.100 individu (New York Times 2024) yang terlibat bersamaan dengan pihak kampus memanggil kembali polisi dengan peningkatan kuantitas lebih banyak dari sebelumnya untuk membubarkan perkemahan di Universitas dari wilayah Massachusetts hingga Arizona (Reuters 2024b). Skala ketegangan meningkat ketika para demonstran pro-Palestina bentrok dengan demonstran pro-Israel di UCLA yakni *University of California, Los Angeles* setelah seorang aktivis mahasiswa Yahudi merekam dirinya sendiri saat dihalangi memasuki area kampus oleh demonstran pro-Palestina (US News 2024) sehingga pihak berwenang UCLA menyatakan perkemahan protes tersebut ilegal dan mulai melakukan tindakan sanksi akademik kepada para mahasiswa. Diluar dari itu, mahasiswa *Brown University* setuju untuk membubarkan perkemahan sebagai imbalan atas pemungutan suara oleh dewan pengawas universitas mengenai divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel seperti *Starbucks* dan *Unilever* (Reuters 2024b) berkat strategi yang mereka lakukan seperti memblokade wilayah administrasi kampus dibantu dengan penyebaran media sosial. Hal itu bukan tanpa sebab, karena semuanya bergantung pada reputasi global dan dana dari alumni untuk program kemitraan internasional sehingga menandai kesepakatan pertama semacam itu untuk gerakan protes dan tepat pada tanggal 2 Mei 2024, polisi membubarkan perkemahan pro-Palestina di UCLA (Reuters 2024b).

Gambar 2.2 Aksi penangkapan 3,100 partisipan dalam demonstrasi pro-Palestina



Sumber : *New York Times* “*Campus Protests Led to More Than 3,100 Arrests, but Many Charges Have Been Dropped*” (2024)

Persebaran protes gerakan *encampment* dapat terlihat pada gambar 2.2, menunjukkan adanya persebaran yang sangat padat di wilayah Pantai Timur dengan melibatkan *Columbia University* dan *City College of New York* dan di wilayah Pantai Barat dengan melibatkan *University of California Santa Cruz* hingga *University of California Los Angeles*. Mencapai fase tersebut, penangkapan ini didominasi oleh *public schools* atau perguruan tinggi negeri dengan total 2.013 penangkapan dan *private schools* atau perguruan tinggi swasta dengan total 1.129 penangkapan. Oleh karena itu, skala penangkapan terbesar di masing-masing wilayah diwakili oleh *University of California Los Angeles* dengan total 271 penangkapan di Pantai Barat dan *Columbia University* dengan total 217 penangkapan di Pantai Timur.

Keberhasilan gerakan *encampment* yang dilakukan oleh mahasiswa di Amerika Serikat tidak dilihat dari apakah genosida yang telah terjadi dapat langsung berhenti, melainkan dari seberapa luas gerakan ini menyebar dan mendapat dukungan. Meski ditekan oleh aparat kepolisian, gerakan ini berhasil tersebar luas secara global dengan diikuti oleh universitas lain di seluruh dunia dan menyatukan berbagai kelompok, mulai dari dosen hingga alumni. Gerakan *encampment* juga berhasil memaksa beberapa universitas salah satunya seperti *Brown University* mengalah dan berjanji akan melakukan transparansi aliran dana investasi. Oleh karena itu, gerakan *encampment* dapat menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa sebagai aktor non-negara dapat mengubah opini publik dan memberikan stigma buruk terhadap gencatan senjata serta menentang kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat yang berstandar ganda.

2.2 Tekanan Kebijakan dan Pengaruh Lobi Amerika Serikat

Meluasnya gerakan *encampment* harus berkaitan dengan realita politik yang jauh lebih kompleks dimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Palestina tidak hanya ditentukan oleh prinsip kemanusiaan tetapi kepentingan strategis dan pengaruh lobi politik yang kuat di Washington. Transformasi tuntutan mahasiswa telah membawa struktur kekuasaan dan lobi di Amerika Serikat dalam membendung atau justru merespons tuntutan tersebut. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap genosida Israel-Palestina seringkali dipandang sebagai sebuah perlawanan dalam nilai-nilai demokrasi yang mereka tanamkan. Sebagai negara yang memposisikan diri sebagai polisi moral dunia (Nurcholis 2026), Amerika Serikat justru menjadi pihak yang membantu secara finansial dan militer bagi Israel dengan bantuan tahunan yang mencapai miliaran dolar. Berdasarkan laporan dari *Costs of War Project* Brown University dan *Quincy Institute*, total bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat sejak awal perang hingga September 2025 mencapai sedikitnya \$21,7 miliar (Crawford 2025). Mencapai titik tersebut, mahasiswa melihat bahwa institusi baik pemerintah federal maupun universitas terjebak dalam keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia (Trisnadiwan 2024, 19–20). Dalam konteks ini menandakan bahwa target bukan hanya berasal dari kebijakan luar negeri yang melenceng melainkan struktur kekuasaan yang sulit ditembus oleh aspirasi masyarakat biasa sehingga menciptakan jarak yang semakin lebar antara kepentingan negara dengan moralitas (Trisnadiwan 2024, 19–20).

Kebijakan Amerika Serikat yang cenderung kaku tidak lepas dari pengaruh kelompok lobi seperti *American Israel Public Affairs Committee* atau AIPAC dalam menentukan kemenangan kandidat di kongres melalui donasi yang masif bagi politisi Pro-Israel (Network 2007) dan penarikan dukungan bagi mereka yang kritis. Hal itu selaras dengan sistem politik Amerika

bahwa kelompok lobi memiliki peran legal namun cenderung kontroversial melalui pendanaan kampanye politik (Network 2007). Berangkat dari fakta tersebut menciptakan sebuah tradisi dimana kritik terhadap kebijakan Israel dianggap sebagai bunuh diri politik bagi para pejabat publik. John Mearsheimer dan Stephen Walt dalam karyanya yang berjudul “*The Israel Lobby and U.S Foreign Policy*” menyampaikan bahwa “*Kelompok lobi dapat menghancurkan karir politik seseorang apabila melakukan kritik terhadap Israel tanpa syarat*” (Network 2007). Bagi mahasiswa Pro-Palestina Amerika Serikat pada tahun 2024-2025 secara eksplisit menganggap bahwa pengaruh lobi ini sebagai bentuk pembajakan terhadap kedaulatan demokrasi (VOA 2024). Pengaruh seperti ini menciptakan bobroknya sistem politik oleh kepentingan asupan dana besar sehingga tak mengherankan apabila aktivisme mahasiswa sering mendominasi pemberitaan global namun perubahan kebijakan di tingkat legislatif cenderung berjalan sangat lambat atau bahkan stagnan.

Masuknya asupan dana besar tersebut membuat intervensi ini semakin nyata dengan penggunaan *Anti Semitism Awareness Act* (Alliance 2025) yang digunakan sebagai senjata hukum untuk melabeli segala bentuk kritik terhadap Zionisme sebagai tindakan rasisme. Rancangan Undang-Undang bernama *Anti Semitism Awareness Act* tersebut dirancang untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum anti-diskriminasi di institusi pendidikan Amerika Serikat (Alliance 2025). Singkatnya, merupakan sebuah aturan untuk mempermudah identifikasi kapan sebuah ucapan atau tindakan di ruang lingkup pendidikan, dalam hal ini universitas dengan beralih dari kebebasan berpendapat menjadi sebuah diskriminasi atau pelecehan (Alliance 2025) terhadap warga Yahudi. Penerapan senjata hukum tersebut memicu debat sengit dalam konteks Genosida Palestina karena mengkriminalisasi protes bagi pihak pro-Palestina (Alliance 2025) serta dianggap terlalu luas sehingga membungkam kritik politik yang sah terhadap pemerintah

Israel. Sedangkan bagi pihak pendukung yang didominasi partai republik dan demokrat (Alliance 2025), senjata ini dianggap sebagai standar jelas untuk membedakan kritik politik dan kebencian. Selama periode tahun 2024-2025, Rancangan Undang-Undang ini telah disahkan di tingkat *House of Representatives* Amerika Serikat dengan dukungan besar namun memiliki kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat.

Tindakan tersebut pada akhirnya memicu transisi kepemimpinan dari administrasi Joe Biden ke Donald Trump pada awal 2025 dengan membawa pergeseran strategi dari represi administratif menuju ancaman yang bersifat mengintimidasi. Pada era Biden, represi cenderung dibungkus dalam narasi keamanan publik dengan penggunaan pihak kepolisian dijustifikasi sebagai upaya menjaga ketertiban operasional kampus dari gangguan fisik (Government 2024). Namun, di bawah pengaruh doktrin Trump, fokus beralih pada penghukuman status kewarganegaraan dan legalitas (Government 2025). Ancaman spesifik Trump untuk mencabut visa pelajar internasional (Government 2025) yang terlibat dalam aksi protes pro-Palestina merupakan strategi untuk memecah belah solidaritas mahasiswa dengan menargetkan kelompok yang paling rentan secara hukum (Government 2025). Kebijakan tersebut bukan sekedar upaya penegakan hukum melainkan sebuah bentuk biopolitik, ketika sebuah negara menggunakan hak tinggal seseorang sebagai alat tawar untuk membungkam aspirasi politik. Dengan mengancam deportasi bagi pelajar asing, pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump mengirimkan pesan jelas bahwa ruang akademik di Amerika Serikat hanya terbuka bagi mereka yang selaras dengan garis politik luar negeri negara (Government 2025).

Selain itu, munculnya fenomena *Blacklisting* atau daftar hitam yang disematkan pada seseorang membuat sejumlah firma hukum besar di Wall Street salah satunya Davis Polk & Wardwell (New York Times 2025) dan perusahaan ternama seperti Lattice, Palantir dan Amazon

(News 2025) secara eksplisit menyatakan tidak akan mempekerjakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, hal itu dibuktikan oleh perkataan CEO Palantir *Technologies* bernama Alex Karp (Palantir 2024) misalnya, dalam sebuah wawancara dengan *CNBC* dan diskusi di *Palantir AIPCon* yakni "*We are seeing a collapse of the elite academic institutions in the West... If you are a pro-Hamas protester, Palantir is not for you. You should go work somewhere else*". Eskalasi ini mencerminkan sikap Washington dan pihak-pihak sentral di Amerika Serikat yang menggunakan kuatnya pengaruh imigrasi dan ancaman pemutusan karir masa depan mahasiswa sebagai instrumen untuk menghancurkan gerakan transnasional dari dalam (Government 2025).

Tekanan lobi tersebut tidak hanya berhenti di tingkat pemerintahan, tetapi juga pada kebijakan internal universitas. Sepanjang tahun 2024, prinsip *Donor Revolt* biasa disebut juga sebagai pemberontakan donatur (Laporte 2024) justru menekan rektorat untuk mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya keputusan yang dilakukan oleh pimpinan kampus terhadap isu yang diangkat sehingga membuat para donatur, biasa diisi oleh tokoh terkemuka menggunakan senjata utama mereka yakni uang sebagai sebuah respons (Times 2023). Mudah-mudahan, apabila keputusan pimpinan kampus bertolak belakang dengan argumentasi mereka maka aliran dana dihentikan dan kampus sebagai institusi pendidikan mendapatkan *framing* buruk terhadap hal tersebut. Hal itu selaras dengan fakta bahwa mahasiswa memanfaatkan celah tersebut untuk memaksa pihak kampus melakukan reposisi kebijakan untuk keterlibatan aktif dalam merespons krisis kemanusiaan global dan menjadi bukti bahwa tekanan dari lingkungan akademik mampu mendelegitimasi narasi resmi pemerintah.

Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai *McCarthyisme* yakni sebuah taktik politik yang menghancurkan reputasi seseorang melalui tuduhan yang tidak berdasar (Parlambang 2025), tak heran karena *McCarthyisme* identik dengan sejarah politik Amerika

Serikat (Parlambang 2025). Hal itu dibuktikan dengan pemanggilan para rektor universitas ternama seperti *Columbia University*, UPenn hingga *Harvard University* (Tempo 2024) yang menegaskan bahwa ranah akademik telah dipolitisasi sedemikian rupa (Tempo 2024). Tindakan seperti ini memaksa universitas sebagai institusi pendidikan mengkhianati prinsip utama warga Amerika yakni *freedom of speech* (United Nations 2024) sekaligus *academic freedom* (United Nations 2024) demi mengamankan pendanaan dan reputasi politik sehingga melahirkan respons kampus yang bertindak represif seperti menggunakan kepolisian (Reuters 2024a) untuk membubarkan aktivisme menegaskan bahwa saat ini, institusi pendidikan di Amerika Serikat telah menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan politik luar negeri.

Keterlibatan aparat kepolisian dalam ruang akademik juga memicu strategi perlawanan mahasiswa yang lebih terorganisir. Setelah sebelumnya dinarasikan sebagai pihak yang membantu jalannya gerakan secara kondusif pada era Biden namun seiring berjalannya waktu, alih-alih mereda justru membuat tekanan represif yang bisa terlihat selama proses gerakan *encampment* berlangsung. Gerakan *encampment* menjadi pernyataan politik bahwa ketika ruang dialog formal telah dirusak oleh kepentingan finansial dan politik luar negeri, maka wilayah kampus berubah menjadi ruang sidang rakyat (Daily Princetonian 2024). Dengan demikian, gerakan mahasiswa terasa seperti sebuah audit finansial yang merusak integritas institusi pendidikan.

Hal itu sudah cukup menggambarkan terhadap bagaimana Amerika Serikat lebih memprioritaskan narasi politik yang stabil daripada perlindungan terhadap pentingnya hak konstitusional warganya. Tak cukup sampai disitu, kerugian moral yang dialami aktivis Pro Palestina juga harus dihadapkan pada *doxing trucks* yang dialami mereka melalui mobil-mobil dengan layar LED dan berkeliling di sekitar kampus ternama seperti Columbia dan Harvard

University (CNN News 2024), dengan menampilkan wajah dan nama mahasiswa yang dianggap anti-Israel dengan label "*condemn anti semitism on your campus or resign*" (CNN News 2024). Serangan ini didukung oleh platform media sosial seperti Meta dan X (CNN News 2024) yang mengumpulkan data pribadi mahasiswa untuk kemudian disebarluaskan secara publik.

Keterlibatan mendalam Amerika Serikat dalam genosida Palestina telah melahirkan sebuah kegagalan demokrasi. Di satu sisi, Washington memposisikan diri sebagai garda terdepan pelindung hak asasi manusia global, namun disisi lain, dukungan militer dan diplomatik tanpa syarat terhadap eskalasi kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat Palestina menunjukkan bahwa kepentingan geopolitik sering kali melampaui hati nurani manusia. Bagi gerakan mahasiswa, Amerika Serikat bukan lagi sekadar negara yang memberikan perdamaian, melainkan aktor yang memfasilitasi terjadinya krisis kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi krisis integritas, juga sebuah gugatan fundamental terhadap arah kepemimpinan moral pemerintah Amerika Serikat di mata dunia.

BAB 3

STRUKTUR PELUANG POLITIK DALAM GERAKAN *ENCAMPMENT* DI AMERIKA SERIKAT

Pada bab ini, perspektif dan kebijakan negara Amerika Serikat terhadap gerakan *encampment* akan ditinjau lebih dalam melalui konsep *Political Opportunities Structure* dari Doug McAdam. Terdapat empat variabel yang digunakan antara lain *Openness of Political Institutions*, *Elite Divisions*, *Presence of Allies* dan *State Capacity of Repression* (Mc Adam, McCarthy, et al. 1996, 98–99). *Openness of Political Institutions* membawa institusi politik formal Amerika Serikat seperti Gedung Putih dan Kongres menerapkan strategi yang membatasi adanya ruang gerak mahasiswa sehingga menutup adanya peluang politik dibantu dengan *elite divisions*, membawa perspektif lebih dalam terhadap perpecahan elit yang dirasakan oleh pihak-pihak kekuasaan tertinggi Amerika Serikat. Disamping itu, *Presence of Allies* memberikan aliansi dan strategi yang terlibat dalam mempertahankan peluang politik hingga berakhir dengan *State Capacity of Repression*, sebagai puncak resolusi bagaimana negara Amerika Serikat memberikan represi yang begitu pelik terhadap gerakan *encampment* pada tahun 2024-2025.

3.1 *Openness of Political Institutions* (Keterbukaan Sistem Politik Amerika Serikat)

Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi di dunia pasca berakhirnya perang dingin (Nasir Badu 2015, 10). Berdasarkan fakta tersebut, Amerika Serikat dijuluki sebagai *the guardian of democracy* (Suryakusuma 2025) hingga *champion of democracy* (Nasir Badu 2015) atas pengaruhnya dalam memberikan paham demokrasi di seluruh dunia sehingga membuat terjadinya sebuah momentum bahwa keberpihakan Amerika Serikat terhadap nilai-nilai demokrasi tidak dapat dilepaskan

karena keyakinan yang besar oleh masyarakatnya sebagai prinsip moral dalam upaya pembangunan watak bangsa (Alfonso 2023, 322). Selain itu, demokrasi Amerika Serikat lahir dari adanya sebuah tradisi yang kental akan hak asasi manusia sejak Deklarasi Kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1776 (Britannica 2026) dengan merefleksikan prinsip *life, freedom, and pursuit of happiness* (Nasir Badu 2015, 11) bahkan bagi para imigran yang datang ke Amerika Serikat (Jatmika 2000, 11) sehingga nilai-nilai demokrasi semakin meluas hingga saat ini.

Sistem demokrasi Amerika Serikat berdiri di atas landasan konstitusional dengan berpijak pada prinsip supremasi hukum atau *rule of law*, dengan menjamin bahwa seluruh otoritas negara harus tunduk pada perintah konstitusi dan putusan pengadilan (US Courts 2026) melalui empat faktor yakni diumumkan secara publik, ditegakkan secara setara, diputuskan secara independent dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia internasional (US Courts 2026). Mekanisme tersebut kemudian dibantu dengan kekuasaan negara yang didistribusikan melalui mekanisme pemisahan kekuasaan secara struktural melalui tiga cabang utama yaitu eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dalam Sistem Presidensial, legislatif melalui Kongres, dan yudikatif (Locke 2025). Pembagian ini diperkuat oleh sistem *Checks and Balances*, sebuah mekanisme pengawasan antar lembaga yang bertujuan mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan (US Government 2026). Selain itu, terdapat pilar federalisme yang membagi wewenang secara vertikal antara pemerintah federal, berfokus pada kebijakan nasional dan global (US Government 2026) dan negara bagian, berfokus pada urusan domestik setiap wilayah seperti pendidikan, kesehatan bahkan aturan pemilu lokal (US Government 2026), keduanya digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak tersentralisasi sepenuhnya, mempertegas bahwa Amerika Serikat selalu punya cara tersendiri dalam berpolitik. Strategi berpolitik tersebut juga tak luput dari hadirnya otoritas yang dimiliki Amerika Serikat yang bersifat menyeluruh dengan membaginya ke dalam

tiga ranah kekuasaan seperti *Foreign Policy Authority* atau otoritas kebijakan luar negeri (US Government 2026) yang berfokus pada Presiden sebagai otoritas eksklusif dan Kongres dalam menentukan arah geopolitik negara. Selain itu, terdapat *Legal Coercive Authority* atau otoritas hukum dan keamanan dimana hak monopoli negara untuk menggunakan kekerasan sah melalui aparat kepolisian (US Government 2026), sering disebut sebagai *legitimate of physical force* dan digunakan jika dibutuhkan. Kekuasaan ketiga yakni *Administrative Authority* atau otoritas administratif dan finansial yang menitikberatkan pada kemampuan pemerintah dalam mengontrol instrumen anggaran bagi pihak yang terlibat dengan negara (US Government 2026).

Seluruh aspek landasan konstitusional ini pada akhirnya bermuara pada hak perlindungan dan kebebasan sipil (US Government 2026), yang menempatkan masyarakat sipil dapat berkumpul secara damai, mengajukan petisi kepada pemerintah hingga melakukan kebebasan berpendapat yang terlindungi. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat dilarang keras melarang sebuah opini hanya karena pemerintah tidak menyukai konteks opini tersebut. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat, terdapat doktrin yang disebut *preferred position* (US Government 2026). Doktrin tersebut memiliki arti jika hak kebebasan berpendapat berbenturan dengan kepentingan pemerintah maka hukum secara otomatis akan mengutamakan hak kebebasan berpendapat terlebih dahulu, kecuali pemerintah bisa membuktikan adanya bahaya yang sangat fatal.

Sayangnya yang terjadi saat ini jauh dari harapan. Semakin berkembangnya zaman, Amerika Serikat hadir sebagai sebuah negara yang melanggar aturan hukumnya sendiri karena terlalu fokus terhadap sebuah kepentingan, sehingga justru melanggar batasan moral dan hak asasi manusia. Dalam konteks gerakan *encampment*, universitas dianggap sebagai ruang aman dimana negara tidak boleh campur tangan terhadap isi pembicaraan publik. Transparansi

merupakan sebuah inti dari demokrasi yang sehat (Greenberg 2025) dan warga Amerika berhak mempertahankan hak mereka serta menegaskan bahwa pemerintah juga bekerja untuk mereka, bukan untuk membantu kepentingan khusus.

Namun kenyataannya, negara menyikapi gerakan *encampment* dengan melakukan penyempitan ruang gerak. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan dalih ketertiban umum dan keamanan nasional untuk membatasi aksi para mahasiswa. Dengan kata lain, negara secara formal memperbolehkan mahasiswa berbicara namun secara teknis justru menghalangi cara mereka berbicara sehingga menimbulkan dampak yang bersifat merugikan bagi beberapa pihak. Hal ini menegaskan bahwa indikator demokrasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah terjadi pembiasan karena unsur kepentingan nasional kerap kali lebih mengemuka dibandingkan mengutamakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang terjadi. Bersamaan dengan gerakan *encampment*, Amerika Serikat telah mengizinkan demonstrasi di ruang publik sebagai manifestasi amandemen pertama yang diratifikasi dan mulai diberlakukan sejak 15 Desember 1791 (American Library 2026) namun yang terjadi adalah *systemic closure* yakni penutupan sistemik daripada sebuah dialog demokratis. Secara substansial, negara secara proaktif menutup akses terhadap perubahan kebijakan nyata dan respons dari institusi kongres dan Gedung Putih Amerika Serikat sebagai pusat kekuasaan legislatif dan eksekutif di Washington D.C (White House 2026), semakin menguatkan hal tersebut. Selain itu, pemerintahan Joe Biden juga menunjukkan pola seperti tuli politik terhadap substansi tuntutan salah satunya dengan menyetujui paket bantuan militer tambahan ke Israel secara *unconditional support*, tanpa syarat (Crawford 2025).

Hal itu memicu meledaknya amarah publik yang membuat Ratusan demonstran pro-Palestina berkumpul di depan Gedung Putih pada tanggal 18 Maret 2025 dengan

meneriakkan kalimat “*Embargo senjata sekarang!*” dan “*Akhiri pendudukan sekarang!*” (Metro TV 2025) menunjukkan semakin besarnya tekanan internasional terhadap kebijakan Amerika Serikat dalam mendukung Israel. Besarnya animo gerakan tersebut memicu adanya tindakan tegas Amerika Serikat bersama Israel untuk setidaknya meredam potensi terjadinya represi lebih besar dengan menghubungi Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu untuk bertemu di Gedung Putih (BBC News 2025).

Skala besar tersebut mendukung adanya sebuah resolusi perjanjian perdamaian Gaza dan melalui Trump, berisi 20 poin kesepakatan perdamaian di Gaza dengan melibatkan banyak komponen politik, militer dan kemanusiaan yang berlangsung secara bertahap (Tempo News 2025). Lebih dari 20 kepala negara membahas perdamaian tersebut di Mesir pada tanggal 13 Oktober 2025 (Tempo News 2025) dan per awal Mei 2026, masih dalam tahap pelaksanaan namun situasinya sangat tidak menentu dan sering dilanggar karena laporan menunjukkan adanya pelanggaran gencatan senjata yang terus menerus oleh Israel (Metro TV 2026) meski Amerika Serikat telah membentuk sebuah dewan perdamaian atau *Board of Peace* untuk mengawasi wilayah dan sebuah komite teknokrat Palestina (Metro TV 2026).

Oleh karena itu, telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan sistem politik yang terbuka secara konstitusi dengan memperbolehkan hak protes yang tertuang dalam aturan hukum, namun terhadap gerakan *encampment* yang terbentuk karena adanya genosida Palestina memiliki keterbukaan sistem politik yang tertutup. Hal itu didasari oleh adanya kepentingan luar negeri yang beraliansi lebih kuat terhadap Israel sehingga dapat berkontribusi dalam stabilitas politik Amerika Serikat. Selaras bahwa Amerika Serikat hanya membuka pintu pada hal-hal yang bersifat prosedural agar amarah publik tidak berubah menjadi revolusi, bukan keterbukaan untuk perubahan nyata salah satunya merancang sebuah resolusi perjanjian perdamaian Gaza yang pada

realitanya, tetap saja masih terkendala dan peristiwa genosida Palestina pun masih berlangsung. Pemerintah Amerika Serikat bersifat tertutup juga bisa terlihat dalam *Anti Semitism Awareness Act* yang telah disahkan oleh Kongres, sesuai dengan data pada bab sebelumnya ditambah segala kerugian yang dirasakan oleh para aktivis gerakan *encampment* telah mempertegas seluruhnya.

3.2 *Elite Divisions* (Perpecahan Elit dalam Sistem Politik Amerika Serikat)

Doug McAdam menekankan bahwa divisi elit dalam sebuah mobilisasi merupakan peluang emas bagi gerakan sosial untuk mendapatkan sekutu dan legitimasi demi sebuah tujuan (Mc Adam, McCarthy, et al. 1996, 100). Untuk mencapai hal tersebut biasanya terjadi sebuah peristiwa politik bernama perpecahan elit. Perpecahan elit merupakan sebuah situasi ketika berbagai kelompok pemegang kekuasaan tertinggi seperti elit politik, militer hingga korporasi mengalami sebuah perselisihan serius (US Government 2026) terkait arah kebijakan negara, keamanan nasional atau nilai-nilai fundamental (Nasir Badu 2015, 16). Mengacu pada politik domestik Amerika Serikat, negara adidaya ini didominasi oleh dua partai besar seperti partai demokrat dan partai republik (US Government 2026). Selain itu, terdapat beberapa partai kecil (US Government 2026) yang juga aktif memberikan signifikansi lebih. Tak lupa, Konstitusi Amerika Serikat 1787 juga terlibat sebagai dokumen tertinggi yang mengatur pembagian struktur yaitu eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dalam Sistem Presidensial, legislatif melalui Kongres, dan yudikatif yang berkaitan dengan mekanisme undang-undang (Locke 2025)

Secara umum, Partai Demokrat sering disebut sebagai kelompok liberal atau progresif di spektrum politik Amerika Serikat (US Government 2026) memiliki perspektif dengan berhaluan pada ideologi tengah kiri yang kental akan keyakinan bahwa pemerintah harus memiliki peran aktif dalam mengutamakan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi hingga perlindungan hak-hak

sipil warga negara (US Government 2026) yang dibuktikan dengan layanan kesehatan publik yang terjangkau dan penguatan hak pekerja serikat buruh. Hal tersebut dilakukan sebagai timbal balik karena Partai Demokrat telah mendorong sistem perpajakan progresif yang memiliki rentang tarif PPh antara 10% hingga 37% dengan menyesuaikan terhadap pendapatan masyarakatnya (VOA 2026). Karena pendekatan dengan rakyatnya membuat Partai Demokrat sangat vokal dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas seperti hak reproduksi perempuan dan keadilan rasial (VOA 2026) sehingga tak mengherankan apabila partai demokrat cenderung menyukai pendekatan dengan menekankan pentingnya isu hak asasi manusia serta demokrasi dalam hubungan internasional. Berkaca pada hal tersebut, Partai Demokrat menjadi pihak yang progresif dalam merancang sebuah kebijakan dalam diplomasi internasional dengan tetap berupaya pragmatis untuk menjaga aliansi strategis Amerika Serikat di kancah geopolitik.

Berkebalikan dengan Partai Demokrat, terdapat Partai Republik yang sering disebut sebagai *Grand Old Party* atau kelompok konservatif (History 2026) yang memiliki perspektif dengan berhaluan pada ideologi tengah kanan hingga kanan (History 2026) dan kental akan keyakinan pada gagasan kebebasan individu dan pembatasan peran pemerintah (Britannica 2026). Dalam politik domestik Amerika Serikat, partai republik memperjuangkan sistem ekonomi pasar bebas melalui pengurangan anggaran belanja pemerintah demi mendorong pertumbuhan sektor swasta dan pemotongan pajak (Britannica 2026). Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Partai Republik cenderung mengadopsi prinsip *America First* yang menekankan pada kekuatan militer yang dominan, kental akan sikap skeptisme perlindungan agresif terhadap kepentingan nasional serta sekutu strategis utama (US Government 2026) Amerika Serikat di luar negeri, salah satunya seperti Israel.

Partai Demokrat meyakini bahwa keamanan dan kepentingan nasional Amerika Serikat paling efektif dicapai melalui kepatuhan terhadap hukum internasional, penguatan aliansi serta penekanan agenda kebijakan yang bersifat universal (US Government 2026) salah satunya seperti penegakan hak asasi manusia. Sebaliknya, Partai Republik lebih mengutamakan proyeksi kekuatan militer yang dominan, perjanjian bilateral yang transaksional serta perlindungan tanpa kompromi terhadap kedaulatan negara dan sekutu strategis utama yang dinilai memberi keuntungan langsung bagi keamanan domestik Amerika Serikat (Britannica 2026). Dalam konteks gerakan *encampment*, perbedaan orientasi ini menjelaskan mengapa Partai Republik bersikap dalam mendukung penuh hak pertahanan diri Israel atas nama satu aliansi keamanan melalui sekutu strategis utama sementara Partai Demokrat terjebak dalam memilih menyeimbangkan aliansi strategis dan norma hak asasi manusia sehingga muncul keretakan perpecahan elit yang memungkinkan terjadinya peluang kesempatan politik bagi gerakan *encampment* untuk melangkah lebih jauh.

Selama masa transisi pemerintahan Joe Biden ke Donald Trump, Amerika Serikat secara konsisten melakukan pembatasan partisipasi aktor tertentu dengan memutus hubungan antara gerakan mahasiswa Pro-Palestina dengan para sekutu potensial di dalam sistem kekuasaan. Negara bukan hanya mengabaikan tuntutan tersebut tetapi secara aktif menghancurkan peluang politik yang coba dibangun oleh faksi progresif di parlemen. Perpecahan tersebut membuat faksi, sering diartikan sebagai sekelompok orang yang berpolitik menggunakan kesamaan pandangan dan ide dalam sebuah peristiwa (Sagita 2025, 1). Dalam konteks ini, faksi terbagi menjadi dua antara lain faksi progresif berasal dari Partai Demokrat yang memberikan dukungan moral serta menjadi suara gerakan (Sagita 2025, 14) di dalam Kongres dengan melakukan kritik secara terbuka dengan faksi moderat, berasal dari Partai Republik yang memegang kendali atas

kebijakan resmi pemerintah federal dan kepemimpinan partai (Sagita 2025, 14) serta menjadi pihak yang berperan dalam melakukan konsolidasi elit untuk menjaga hubungan strategis dengan Israel. Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, keduanya bertindak sesuai dengan gagasan yang mereka tanam dalam politik domestik Amerika Serikat.

Gambar 3.1 Faksi Moderat Amerika Serikat



Sumber : *The Hill* (2025) meliputi Donald Trump (pertama), John Fetterman (kedua), Hakeem Jeffries (ketiga), Joe Biden (keempat) dan Chuck Schumer (kelima)

Faksi moderat lahir dengan menitikberatkan pada kewenangan yang mengutamakan nilai genosida oleh Israel serta menganggap remeh nilai kemanusiaan rakyat Palestina. Hal itu dibuktikan dengan Joe Biden yang terletak pada gambar 3.1 di urutan keempat, menghadapi tekanan besar dari aktivis pro-Palestina dan sayap progresif partainya yang menuntut penghentian total pasokan senjata ke Israel karena tingginya korban sipil (US Government 2025) membuatnya menyeimbangkan kebijakannya tepat sebelum masa jabatannya berakhir. Bantuan militer ke Israel juga didukung penuh oleh Chuck Summer sebagai pemimpin mayoritas senat sesuai dengan gagasan Partai Republik yang diusungnya mengutamakan kekuatan militer, terletak pada gambar 3.1 di urutan kelima yang juga sangat keras mengutuk aksi pendudukan kampus yang dianggapnya melampaui batas dan memiliki julukan sebagai zionis oleh aktivis Pro-Palestina

(Anadolu 2025). Selain itu, seorang senator bernama John Fetterman, terletak pada gambar 3.1 di urutan kedua menegaskan dukungan kuat untuk operasi militer Israel melawan Hizbullah di Lebanon (NBC News 2024a) dan menyebut Palestina sebagai hinaan bagi Israel (Jewish 2024). Pengaruh kuat faksi progresif juga didukung oleh suara dominan demokrat di Parlemen yang memastikan bahwa suara-suara progresif tidak sampai mengubah kebijakan luar negeri dan hal tersebut dilakukan oleh Hakeem Jeffries selaku pemimpin minoritas *House of Representatives United States* yang terletak pada gambar 3.1 di urutan ketiga juga terlibat hubungan dekat dengan AIPAC (Bought by Zionism 2025). Sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi Amerika Serikat saat ini, Trump secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap protes kampus dan melakukan deportasi lebih dari 6000 visa pelajar asing bagi pihak yang terlibat (BBC News 2025).

Gambar 3.2 Faksi Progresif Amerika Serikat



Sumber : *The Guardian* (2025) meliputi Alexandra (pertama), Cori Bosh (kedua), Ilhan Omar (ketiga) dan Bernie Sanders (keempat)

Disamping itu, terdapat politikus dan aktivis Amerika yang tergabung dalam partai demokrat bernama Alexandra Ocasio-Cortez, terlihat pada gambar 3.2 urutan pertama yang sering mengkritik penangkapan mahasiswa dan menyebut tindakan polisi di kampus sebagai

pelanggaran hak demokratis (Tempo News 2025). Sebagai salah satu kritikus paling tajam terhadap Israel di *House of Representatives*, Alexandra Ocasio-Cortez turut memberikan kritik terhadap serangan udara Israel dan mendesak penghentian bantuan militer (CNN News 2024), mendatangi gerakan aktivis mahasiswa di Columbia University (NBC News 2024b) hingga menghadang bantuan ke Israel seakan pertanda arah demokrat untuk pemilu Amerika Serikat di tahun 2028 (IDN News 2026). Keterlibatannya mengenai genosida sering menjadi pembicaraan hangat menandakan bahwa beliau termasuk pihak yang solid untuk dilibatkan dalam *Presence of Allies* pada perspektif Doug McAdam.

Mencapai keberagaman faksi progresif yang terlibat, dua politisi progresif Amerika Serikat dari Partai Demokrat terlihat pada gambar 3.2 yakni Cori Bush di urutan kedua dan Ilhan Omar di urutan ketiga mencapai potensinya ketika berhasil memimpin pengajuan resolusi gencatan senjata, *ceasefire* di Kongres Amerika Serikat (Ramirez House 2023) dengan mendesak pemerintahan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut gencatan senjata dengan memimpin koalisi lebih dari 380 pemimpin dunia melalui diplomasi internasional (The Guardian 2023). Selain itu, keduanya sering bergabung dalam aksi protes di depan Gedung Capitol bersama kelompok aktivis seperti "*Doctors Against Genocide*" untuk menuntut diakhirinya pengepungan Gaza (TrT World 2023). Sayangnya karena sikap kerasnya ini, kelompok lobi pro-Israel seperti AIPAC mengeluarkan dana jutaan dolar untuk mendukung lawan politik mereka dalam pemilu. Hal ini berkontribusi pada kekalahan Cori Bush dalam pemilihan pendahuluan tahun 2024, meski Cori Bush mencalonkan diri kembali untuk pemilu 2026 (Common Dreams 2025).

Meskipun bukan anggota resmi demokrat, hanyalah pemimpin independen yang berkoalisi dengan demokrat, Bernie Sanders yang terlihat pada gambar 3.2 di urutan keempat

secara konsisten memberikan vokalnya untuk pemberhentian bantuan senjata ke pemerintahan Netanyahu (The Guardian 2024). Hal ini dilakukan karena kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus didasarkan pada standar hak asasi manusia yang konsisten. Mencapai fase tersebut, Bernie mengajukan resolusi untuk memblokir penjualan senjata ke Israel dengan memaksakan pemungutan suara di Senat untuk menghentikan pengiriman bom seberat 1.000 pon dan bulldozer yang digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah di Tepi Barat dan Gaza (Responsible Statecraft 2026). Di samping itu, Bernie Sanders merupakan pemimpin dengan pemikiran yang adil dan berimbang dengan tetap mendukung hak Israel untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan, namun juga menegaskan bahwa perdamaian tersebut tidak akan pernah tercapai selama pendudukan atas wilayah Palestina terus berlanjut (New York Times 2024).

Dari Bernie Sanders yang mengajukan sebuah resolusi hingga Alexandra Ocasio-Cortez yang mendatangi gerakan *encampment* dan memberikan kritik terhadap serangan udara Israel hingga mendesak penghentian bantuan militer, menjadi bukti bahwa elit telah melegitimasi tuntutan mahasiswa ke dalam ruang sidang parlemen. Selain itu, tindakan Cori Bush dalam menuntut gencatan senjata melalui diplomasi internasional dan Ilham Omar yang sering terlibat dalam aksi protes bersama para aktivis menandakan elit telah berhasil merumuskan tuntutan demonstran menjadi pembentukan kebijakan resmi yang bersifat berkelanjutan sebagai sebuah jawaban atas ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Hal ini menegaskan keberhasilan mereka sebagai Partai Demokrat dalam mengutamakan hak asasi manusia.

Gambar 3.3 Rashida Tlaib Memperkenalkan Resolusi Untuk Menghukum Genosida Israel



Sumber : *IMEU Policy Project “Rashida Tlaib and 20 Cosponsors Introduce Resolution to punish Israel’s Genocide ” (2025)*

Dalam menanggapi sebuah genosida, faksi progresif yang dikenal paling vokal adalah Rashida Tlaib, terlihat pada gambar 3.3 menunjukkan Rashida Tlaib sebagai satu-satunya anggota Kongres keturunan Palestina yang menuduh pemerintah melakukan kekejaman terhadap rakyat Palestina (Congress Woman 2025). Tindakan terakhirnya adalah dengan memperkenalkan sebuah resolusi yang secara resmi mengakui bahwa Pemerintah Israel melakukan genosida kepada rakyat Palestina dan memastikan negara Amerika Serikat untuk segera melakukan tindakan konkret guna memenuhi kewajiban hukumnya yang mengikat (MEU Policy Project 2025). Resolusi yang berisi penyelidikan dan tuntutan terhadap individu dan korporasi di Amerika Serikat yang terlibat dalam kejahatan genosida, mematuhi perintah Mahkamah Internasional dengan penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional, pemberhentian transfer senjata dan peralatan hingga sanksi yang ditargetkan kepada negara Israel dengan individu atau perusahaan yang terlibat dalam genosida (Congress Woman 2025) itupun didukung keras oleh 20 sponsor dan lebih dari 100 organisasi (MEU Policy Project 2025) salah satunya *Maryland United for Peace and Justice* dan

The American Council for Judaism (Congress Woman 2025). Hingga per Mei 2026, Rashida Tlaib juga mengecam rancangan undang-undang Israel yang akan mewajibkan hukuman mati bagi tahanan Palestina (Anadolu 2026).

Berdasarkan data diatas, terdapat tiga perpecahan elit yang berkaitan dengan gerakan *encampment* antara lain perbedaan pada pandangan dalam membela hak sipil yang dilakukan oleh faksi progresif dan tuntutan ketertiban yang sesuai dengan *prinsip rule of law* Amerika Serikat yang dilakukan oleh faksi moderat, menitikberatkan pada dominasi militer. Selain itu, perbedaan dalam mengkritik pemerintah Israel karena tindakan genosidanya adalah hal yang sah bagi faksi progresif namun berbanding terbalik oleh faksi moderat yang mendukung *Anti Semitism Awareness Act*, telah diresmikan secara sah oleh negara dan bagi faksi progresif, peresmian undang-undang tersebut merupakan bentuk dari pembungkaman kebebasan berbicara. Perpecahan yang terakhir bersumber pada wadah dalam membentuk kebijakan luar negeri seperti yang dilakukan oleh faksi progresif dalam menghentikan bantuan militer ke Israel sedangkan bagi faksi moderat, tetap berkomitmen menjaga aliansi strategis dengan Israel.

Bersumber tahun penelitian yang terjadi pada 2024-2025, terdapat pergeseran kepemimpinan presiden antara Joe Biden dengan Donald Trump. Pada era Joe Biden, perpecahan elit terjadi ketika faksi moderat menolak tuntutan mahasiswa untuk menghentikan bantuan militer demi menjaga stabilitas geopolitik di Timur Tengah. Namun tetap tidak bisa menindak mahasiswa secara frontal karena Joe Biden membutuhkan suara kelompok masyarakat berusia muda dalam pemilu sebelum mengundurkan diri pada bulan juli 2024 (US Government 2026). Di saat yang sama, faksi progresif mendatangi gerakan *encampments* seperti Ilhan Omar dan Alexandria Ocasio-Cortez untuk memberikan perlindungan politik. Pada fase ini, gerakan *encampment* belum dipenuhi oleh tekanan represi sehingga dapat menyebar secara luas.

Sedangkan pada era Donald Trump, pengesahan *Anti Semitism Awareness Act* telah dilakukan, tuntutan pemotongan dana dan investasi bagi universitas yang tidak satu suara juga diberlakukan hingga penangkapan dan ancaman deportasi semakin menambah pelik karena terjadi represi fisik dan administratif secara berkelanjutan. Berdasarkan data diatas, terdapat perbedaan dalam kepemimpinan Joe Biden dan Donald Trump dalam menyikapi gerakan *encampment*.

Diluar dari itu, perpecahan internal di tingkat elit partai antara faksi progresif dan moderat secara tidak langsung menjadi faktor yang dapat mendorong atau *encourage* keberlanjutan gerakan *encampment*. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan non pemerintah namun influential seperti CNN, *Fox News*, *New York Times*, *Amnesty* hingga organisasi yang mendukung Palestina sebagai elit sekutu tidak hanya memberikan legitimasi dan perlindungan politik bagi aktivis gerakan *encampment*, tetapi juga mendorong agar gerakan ini mampu berkembang secara luas dengan memanfaatkan celah perpecahan elit tersebut.

3.3 *Presence of Allies* (Kehadiran Sekutu Berpengaruh Sistem Politik Amerika Serikat)

Keterlibatan sekutu non pemerintah namun influential seperti CNN, *Fox News* hingga *New York Times* dalam memandang gerakan *encampment* telah membawa narasi yang cenderung progresif ke dalam masyarakat sehingga dapat mengetahui setiap perkembangan gerakan yang terjadi. Adapun media independen juga melakukan hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Chris Hedges, mantan Jurnalis *New York Times* dengan secara terbuka mendatangi gerakan *encampment* di *Columbia University* dan universitas lain untuk memberikan pidato solidaritas serta menulis kolom nasional yang membela gerakan tersebut (LA Daily News 2024) hingga Amy Goodman dengan team *Democracy Now!* secara konsisten memberikan liputan harian yang bersimpati kepada mahasiswa dengan melakukan wawancara pemimpin demonstrasi secara

langsung ketika media arus utama menolak berbicara dengan mereka (Democracy Now 2026). Keterlibatan elit media memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik karena telah berhasil melegitimasi tuntutan mahasiswa menggunakan *framing* atau pemingkaian, untuk mengolah suatu peristiwa.

Tak lupa, keterlibatan *Non-Governmental Organization* pro-Palestina seperti *US Campaign for Palestinian Rights* yang menyediakan dana dan program advokasi (Influence Watch 2025), *Amnesty International United States* dan *Human Rights Watch* yang merilis laporan-laporan kritis yang mengecam tindakan represif kepolisian dan birokrasi kampus (Callamard and Borello 2025) hingga *American Muslims for Palestine* sebagai penggerak mobilisasi (Caschetta 2026) yang mengutuk dampak dari kerasnya genosida. Proses tersebut dibantu oleh keterlibatan aktif kelompok mahasiswa Yahudi pro-perdamaian, seperti *Jewish Voice for Peace* (Mundi 2024) yang dibentuk oleh Julie Iny, berdiri di baris terdepan bersama mahasiswa muslim dan kulit berwarna lainnya. Dengan mengusung semboyan '*Not in Our Name*', kelompok-kelompok ini mempertegas bahwa kritik terhadap kebijakan negara Israel dan solidaritas terhadap warga Gaza adalah dua hal yang berbeda dari kebencian terhadap identitas agama (Mundi 2024). Dalam menjamin dukungan terhadap gerakan *encampment*, sekelompok dosen yang tergabung pada *Faculty for Justice in Palestine* membentuk perlindungan seperti pagar agar para polisi tidak dapat menekan mereka (Influence Watch 2025) dan para dosen di *Columbia University* dan *New York University* menjamin menahan nilai semester akhir jika pihak rektorat tidak mencabut skorsing terhadap mahasiswa aktivis (The Guardian 2024). Selain itu, ketika para mahasiswa aktivis tertangkap oleh aparat kepolisian, keterlibatan organisasi *American Civil Liberties Union* bersama ikatan alumni membuat sebuah jaminan berupa *freedom fund* atau pembebasan dengan membayar uang jaminan dengan menyediakan pengacara gratis untuk

mendampingi persidangan (ACLU 2024). Selama gerakan *encampment* berlangsung, anggota faksi progresif juga mendatangi lokasi untuk melakukan pengawasan (TrT World 2023). Mencapai titik tertinggi terdapat tokoh masyarakat atau *public figure* seperti Bella Hadid, Joaquin Phoenix hingga Mahershala Ali selaku pro-Palestina yang memposting keberpihakan mereka melalui postingan di media sosial (Revealer 2026) sebagai cara elit non-pemerintah melegitimasi tuntutan mahasiswa yang berpihak kepada Palestina.

3.4 *State Capacity of Repression* (Kapasitas Represi Negara Amerika Serikat)

Mencapai variabel keempat dari Doug McAdam yakni kapasitas represi suatu negara, Amerika Serikat menunjukkan eskalasi dari represi fisik menuju represi administratif yang terkoordinasi dalam menghapus gerakan mahasiswa Pro-Palestina. Sebagai negara adidaya di dunia, Amerika Serikat berbekal tatanan hukum dan sumber daya menunjukkan kecenderungan yang tinggi untuk menghapus gerakan mahasiswa Pro-Palestina. Selama periode 2024, penggunaan kepolisian lokal dari negara bagian yang merangsek masuk ke dalam lingkungan kampus secara masif telah membubarkan perkemahan di berbagai universitas ternama dengan penggunaan gas air mata, peluru karet, dan *flashbang* (CNN News 2024), telah terbukti termasuk kedalam represi fisik secara langsung (Amnesty 2026). Hal itu juga dibuktikan dengan penangkapan massal terhadap lebih dari 3.100 individu, termasuk mahasiswa dan anggota fakultas akademik (New York Times 2024b) yang dianggap sebagai pihak yang mengancam keamanan nasional. Pada fase ini, telah terjadi kemampuan negara menggunakan otoritasnya untuk melegitimasi gerakan di mata publik sehingga represi fisik yang dilakukan aparat dianggap sah oleh masyarakat. Selain itu, negara menggunakan instrumen hukum untuk mengubah status demonstran dari aktivis politik menjadi pelaku kriminal dengan proses pengadilan yang menguras

energi, waktu, dan finansial mahasiswa melalui biaya jaminan sebagai syarat pembebasan bersyarat, meski terdapat organisasi *American Civil Liberties Union* yang membantu. Pada tahap ini, Amerika Serikat tidak menjalankan prinsip *rule of law* yang dianutnya karena bersifat merugikan.

Sangat ironis mengingat Amerika Serikat termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia pendidikan dan sering menjadi tujuan bagi mahasiswa mancanegara hal itu dibuktikan dengan anggaran pembelanjaan negara yang meningkat pesat di berbagai wilayah (CNBC 2025) seperti Florida dan Virginia. Beasiswa yang diberikan oleh negara pun memiliki total lebih dari 1,7 juta beasiswa disertai *fellowship* sekitar \$46 miliar setiap tahunnya (Cross River 2026) berbanding terbalik dengan hak yang dirasakan oleh mahasiswa pro-Palestina di universitas yang harus mengalami represi secara administratif.

Represi administratif terjadi ketika mencapai periode tahun 2025 di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengalami perubahan melalui kebijakan federal yang lebih keras dengan melakukan kriminalisasi menggunakan taktik protes melalui ancaman deportasi bagi mahasiswa internasional dan pencabutan visa bagi yang terlibat dalam aksi protes karena dianggap sebagai pihak yang mengancam keamanan nasional. Berdasarkan laporan hingga Januari 2026, Trump telah melakukan penarikan hampir 1.500 visa (Amnesty 2025) dari 8000 visa pelajar (Inside Higher 2026) yang terindikasi telah terlibat dalam gerakan Pro-Palestina dengan sisanya berkaitan dengan masalah administrasi. Sayangnya penarikan tersebut hadir sebagai bentuk efek jera sehingga secara efektif menutup keberanian mahasiswa untuk melakukan dinamika gerakan yang meluas. Bahkan dampak dari tekanan finansial hingga pembatasan kebebasan akademik juga tidak diprioritaskan oleh negara dibuktikan dengan pembatalan hibah dan kontrak senilai ratusan juta dolar kepada universitas pro-Palestina salah

satunya seperti *Harvard University* yang terancam kehilangan dana hingga US\$9 miliar dan setidaknya US\$400 juta (Rp 6,5 triliun) dana hibah telah dibatalkan oleh Trump (Detik News 2025b). Ini menegaskan bahwa Amerika Serikat telah menjalankan pemaksaan birokrasi kampus yang bertindak sebagai perpanjangan tangan represi negara. Selain itu, keterlibatan *doxing* dan pencabutan tawaran pekerjaan dari firma elit dirasakan oleh mahasiswa dan elit aliansi (Sindo 2024) yang terlibat, hanyalah sebuah angin lalu dan tidak menjadi prioritas negara yang menjamin hak warga negaranya sesuai dengan prinsip demokrasi.

Bagi kelompok penguasa yang tergabung dalam mendukung keberpihakan terhadap Palestina tak luput dari adanya tekanan represi. Amerika Serikat melalui *House of Representatives United States* mengeluarkan *resolusi censure* atau teguran resmi terhadap anggota faksi progresif seperti Rashida Tlaib yang sangat vokal dalam genosida Palestina oleh pihak Israel dengan total sebanyak 234 suara mendukung kecaman untuk Tlaib, berbanding terbalik dengan 188 suara lainnya yang menolak (Detik News 2025a). Hal tersebut merupakan sebuah teguran keras dengan Partai Demokrat berhasil memblokir aksesnya untuk masuk kembali kedalam parlemen (VOA 2023). Sepanjang tahun 2024, Kongres Amerika Serikat menggunakan mekanisme pemanggilan paksa dan ancaman pemotongan dana sebagai suatu peringatan keras yang lebih seperti ancaman seperti yang dialami oleh Nemat Shafik, rektor *Columbia University* dikritik usai memanggil polisi New York untuk membubarkan perkemahan para demonstran di lingkungan universitas pada tanggal 18 April 2024 (Detik News 2024) dengan dianggap telah mengacaukan kebebasan akademik dan tidak menghormati hak pribadi hingga membuat Mike Johnson, selaku ketua *House of Representatives United States* memilih agar Nemat Shafik resign karena mahasiswa Yahudi merasa tidak aman di bawah kepemimpinannya (Detik News 2024). Tak luput, rektor *Sonoma State University* bernama Ming-Tung Lee juga dibebastugaskan karena

menarik investasi dari Israel dan menyetujui atas kampanye aktivisme Pro-Palestina (Harian Kompas 2024).

Dengan menggunakan otoritas eksekutif, Amerika Serikat juga menciptakan resiko politik yang sangat tinggi bagi aliansi mana pun yang memiliki keberpihakan pada gerakan mahasiswa sehingga mematikan peluang munculnya sekutu baru dari kalangan moderat, dengan tidak condong ke sayap kiri maupun kanan dalam berpolitik (Jasmiko 2025). Hal ini menandakan meskipun tokoh-tokoh seperti Rashida Tlaib dan Alexandra Ocasio-Cortez mencoba membawa aspirasi mahasiswa ke dalam tuntutan utama kebijakan, negara melalui kepemimpinan arus utama Partai Demokrat tetap mengunci rapat negosiasi.

Tanpa adanya dukungan dari sekutu aliansi yang memiliki pengaruh nyata dan hanya bergerak dalam satu pola yang sama tanpa adanya jangkauan yang merata secara global, gerakan mahasiswa sepenuhnya menjadi aktor politik yang tidak memiliki pengaruh dalam sebuah kebijakan pada periode 2024 - 2025. Oleh karena itu, mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memiliki struktur peluang politik yang tetap tertutup, karena negara berhasil menjamin bahwa kebijakan luar negeri tetap kebal dari pengaruh aktor-aktor internal yang bersimpati pada gerakan Pro-Palestina. Menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya diabaikan secara politik, tetapi juga dipadamkan secara paksa melalui otoritas kekuasaan negara.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika gerakan *encampment* pada periode 2024-2025 melalui konsep *Political Opportunity Structure* yang dirumuskan oleh Doug McAdam secara tegas mengonfirmasi bahwa gerakan ini berhadapan dengan sebuah struktur peluang politik yang tertutup rapat atau *fully closed political structure*. Penutupan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pengaruh kekuasaan negara yang bekerja sama melalui empat variabel utamanya. Pertama, institusi politik formal seperti Gedung Putih dan Kongres menerapkan strategi regulasi yang bersifat membatasi demi menjaga aliansi dengan Israel. Variabel kedua memberikan bukti bahwa potensi keretakan di tingkat elite dapat muncul karena perbedaan gagasan dua partai besar dalam politik domestik Amerika Serikat. Variabel ketiga menggambarkan sekutu elit potensial mahasiswa untuk mendukung gerakan meski dipatahkan oleh realita bahwa negara Amerika Serikat tetap berpegang teguh pada aliansinya. Variabel terakhir membawa struktur ketertutupan ini telah disegel secara absolut oleh kapasitas dan kecenderungan represi negara yang sangat tinggi, secara fisik menitikberatkan dalam membubarkan ruang-ruang mobilisasi di lebih dari 60 universitas dan mengkriminalisasi para aktor yang terlibat melalui lebih dari 3.100 penangkapan massal disertai dengan doxing dan pencabutan visa, pemutusan karier hingga kontrak pekerjaan sebagai hak setiap individu warga negara. Tak lupa, tuntutan represi yang dirasakan oleh kelompok penguasa pro-Palestina juga sama peliknya karena tekanan yang diberikan oleh negara Amerika Serikat.

Melalui keempat variabel Doug McAdam tersebut, penelitian ini membuktikan sebuah pemahaman dalam demokrasi Amerika Serikat bahwa demi mengamankan stabilitas aliansi

geopolitik internasional dan kepentingan elite strategis di tingkat global, negara tak segan untuk meninggalkan prinsipnya di tingkat global. Negara Amerika Serikat terbukti menerapkan strategi *counter-mobilization* yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan perluasan jaringan gerakan *encampment*.

Oleh karena itu, selama struktur kesempatan politik di Amerika Serikat tetap dikuasai oleh dominasi lobi politik, modal finansial yang dikeluarkan oleh elite pro-Israel, dan aparat keamanan yang solid maka gerakan mahasiswa *encampment* akan terus terisolasi sebagai aktor luar yang ruang geraknya dibatasi. Dinamika ini juga menegaskan bahwa dalam isu geopolitik yang krusial, Amerika Serikat tidak lagi berfungsi sebagai ruang demokrasi yang rasional dan transparan, melainkan sebuah ajang kekuasaan politik yang secara proaktif menutup setiap celah perubahan yang diupayakan oleh warga negaranya sendiri.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dari segi data dan pembahasan. Oleh karena itu, terdapat beberapa potensi yang dapat ditempuh oleh peneliti selanjutnya untuk memperkaya kajian politik dan gerakan sosial dalam studi hubungan internasional salah satunya dengan mengeksplorasi lebih dalam *Political Opportunity Structure* dengan membedah negara demokrasi barat lainnya seperti Jerman atau Inggris, akan memberikan jawaban konklusif sejauh mana negara-negara liberal mengorbankan hak-hak sipil demi mengamankan kekuatan geopolitik global. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akademis menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Alfonso, Kelvin. 2023. "Alfonso." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* (San Diego State University) Vol 5 No 4 (2023): *International Journal of Science and Society (IJSOC)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ij soc.v5i4.789>.
- Bora, Aman. 2024. "Perceptions of Power: Assessing the Global Perception of the United States after the Ukraine and Gaza Crisis." *Soban Singh Jeena University*, no. Israel-Gaza Crisis (Oktober). <https://ssrn.com/abstract=5001669> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5001669>.
- Meutia Ph.D., Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*. CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. <http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/1/analisis%20kebijakan%20publik%20%281%29.pdf>.
- Sagita, Aririn. 2025. "Charismatic Leadership Dan Demokrasi Substantif Dalam Studi Faksi Politik Pasca Reformasi Di Negara Hukum Indonesia." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (Yogyakarta)* Vol. 6 No. 1, April 2025. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Daal, Jiska van. 2025. "Students United: Escalations of United States' Campus Protests in Historical Perspective." *MA Thesis Conflict Studies and Human Rights (15 ECTS)*, no. Politics (Agustus): 50.
- Abramitzky, Ran, Yphtach Lelkes, Hani Mansour, Tamar Mitts, and Guy Grossman. 2026. "Expression at the Edge: Free Speech Boundaries amidst the Gaza Crisis." Introduction. *National Center for Biotechnology Information* (United States of America), ahead of print, April 15. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aea5427>.
- Mrhizou, Hafid, Jallal Nouredine, dan El Khalafi Omar. 2024. "The Interaction Between Theory and Action in Social Movements: A Critical Analysis." *African Scientific Journal* 03 (25): 19.
- Nasir Badu, Muhammad. 2015. "Demokrasi Dan Amerika Serikat Democracy and the United States of America." *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Volume 1, Number 1, January 2015 (January).
- Argenti, Gili. 2024. "Gerakan Mahasiswa Pro Palestina di Amerika Serikat." *Universitas Singaperbangsa Karawang*, April 29.
- Mahayasa, Dias Pabyantara Swandita, dan Anggi Koenjani Putri. 2024. "Komparasi Narasi Gerakan Pro-Palestina dan Pro-Israel di Amerika Serikat Menggunakan Teori Framing." *Jenderal Soedirman University Jurnal Hubungan Internasional* 17(1): 1-23 (Juni). <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.55670>.

Safrudin, Muhammad Ihwan, Hannifa Rojwa Thalib, Nisa Nuraeni, Kartika Tri Puspita Sari, Sri Nita, dan Dadan Firdaus. 2025. "Gerakan Bela Palestina Sebagai Bentuk Kesadaran Global terhadap Penindasan dan Ketidakadilan." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 1 No. 3 (2025): Juni-September 2025 (Juli): 243–50. <https://doi.org/10.63822/2bxme580>.

Risnita Asrulla, Muhajirin. 2024. "Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian." *Jurnal Gentamulia* Volume 15, Number 1, 2024: 82–92.

Feigenbaum, Anna. 2024. "The Long History of Protest Camps." Online. The Commons Social Change Library, June 5.

Jasmiko. 2025. "Moderasi Beragama: Konsep, Penerapan, Dan Perkembangannya Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://fah.uinjkt.ac.id/id/moderasi-beragama-konsep-penerapan-dan-perkembangannya-di-indonesia>.

Matulessy, Andik, and Djamaludin Ancok. 1997. "Faktor-Faktor Penyebab Gerakan Sosial Mahasiswa." Pt. 32, "88 - 105." Universitas Islam Indonesia XVII/1V. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.v0i32.5862>.

Trisnadiwan, Raisya. 2024. "KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA TERHADAP ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." Universitas Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024) (June). <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>.

Fadya, Salsabila Nanda, M. Nabil Suhendra, Emil Pinata, Jurena Hasibuan, Vieronica Varbi Sununianti, and Deni Aries Kurniawan. 2024. "Global Social Movement : Upaya Masyarakat Internasional Dalam Merespon Tindak Kejahatan Genosida Melalui Resolusi Konflik Nir-Kekerasan Pada Kasus Israel - Palestina." *Jurnal Analisa Sosiologi Program Studi Sosiologi Universitas Sriwijaya (Program Studi Sosiologi Universitas Sriwijaya)* 13 (4) (October): 898–916.

Jatmika, Sidik. 2000. *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*.

Buku

Mc Adam, Doug, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald. 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities*. 1996th ed. Cambridge University Press. The Press Syndicate of The University of Cambridge.

Artikel Daring

Hohenstein, Kurt. 2025. "Sit-in Movement." Online. United States History, December 12. <https://www.britannica.com/event/sit-in-movement>.

Nations, United. 2024. "Gaza: ICJ Ruling Offers Hope for Protection of Civilians Enduring Apocalyptic Conditions, Say UN Experts." United Nation Human Rights, January 31.

- <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/01/gaza-icj-ruling-offers-hope-protection-civilians-enduring-apocalyptic>.
- New York Times. 2024. Bernie Sanders: The US Must Stop Apologist. <https://www.nytimes.com/2021/05/14/opinion/bernie-sanders-israel-palestine-gaza.html>.
- New York Times. 2025. "A Prestigious Law Firm Rescinded Job Offers for Columbia and Harvard Students, but It May Reverse Itself." Online. <https://www.nytimes.com/2023/10/17/business/davis-polk-employment-columbia-harvard-israel-palestine.html>.
- Patnistik, Egidius. 2024. "Apa Tuntutan Mahasiswa Pengunjuk Rasa Pro-Palestina di AS?" *Kompas.com*. 3 Mei 2024. <https://internasional.kompas.com/read/2024/05/03/125553070/apa-tuntutan-mahasiswa-pengunjuk-rasa-pro-palestina-di-as?page=all>.
- Variety. 2024. Jon Voight on Being Hollywood's Most Outspoken Trump Supporter and Fighting Angelina Jolie Over Israel-Palestine: 'She's Been Influenced by Antisemitic People.' July 23. <https://variety.com/2024/film/news/jon-voight-trump-support-israel-palestine-angelina-jolie-1236080058/>.
- LA Daily News. 2024. Meet the Student Journalists Bringing College Campus Protests to the World. <https://www.dailynews.com/2024/05/04/meet-the-student-journalists-bringing-college-campus-protests-to-the-world/>.
- Democracy Now. 2026. Palestine. <https://www.democracynow.org/topics/palestine>.
- Amnesty. 2025. STOP TARGETTING FOREIGN STUDENTS FOR PROTEST. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2025/10/AMR5104192025ENGLISH.pdf>.
- Callamard, Agnès, and Federico Borello. 2025. What Happened to Human Rights for Palestinians? October 31. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/10/what-happened-to-human-rights-for-palestinians/>.
- Caschetta, A. J. 2026. "Is There a Difference Between Jewish Voice for Peace and Students for Justice in Palestine?" *Algemeiner*, January 26. <https://www.algemeiner.com/2026/01/26/is-there-a-difference-between-jewish-voice-for-peace-and-students-for-justice-in-palestine/>.
- Castelnuovo, Andrea. 2025. "The Psychological Toll of Graphic Content in the Israel-Palestine Conflict." *The European Center for Populism Studies*, July 29. <https://www.populismstudies.org/the-psychological-toll-of-graphic-content-in-the-israel-palestine-conflict/>.

- CNBC, News. 2025. Amerika Membuktikan Anggaran Pendidikan Jumbo Tak Menjamin Hasil Bagus. May 9.
- CNN News. 2024. "Names and Faces of Harvard Students Linked to an Anti-Israel Statement Were Plastered on Mobile Billboards and Online Sites." Online, October 12.
<https://edition.cnn.com/2023/10/12/business/harvard-doxxing-truck-israel-hamas-statement>.
- Crawford, Neta. 2025. "The Human Toll of the Gaza War: Direct and Indirect Death from 7 October 2023 to 3 October 2025." Brown University, October 7.
https://costsofwar.watson.brown.edu/sites/default/files/2025-10/Human-Toll-in-Gaza_Costs-of-War_Crawford_7-October-2025.pdf.
- Cross River. 2026. 57 Scholarship Statistics, Facts & Demographics. February 19.
<https://www.crossrivertherapy.com/research/scholarship-statistics>.
- Daily Princetonian, The. 2024. A Timeline of the 'Gaza Solidarity Encampment.'
<https://projects.dailyprincetonian.com/princeton-gaza-solidarity-encampment-timeline-look-back/>.
- Greenberg, Madeleine. 2025. "A Healthy Democracy Requires Transparency." Online. Campaign Legal Center, March 19.
<https://campaignlegal.org/update/healthy-democracy-requires-transparency>.
- MEU Policy Project. 2025. "Rep. Rashida Tlaib and 20 Cosponsors Introduce Resolution to Punish Israel's Genocide | Palestine Policy Roundup 11.17.25." MEU Policy Project Works to Educate Elected Officials, Policy-Makers.
<https://www.imeupolicyproject.org/newsletters/rep-rashida-tlaib-and-20-cosponsors-introduce-resolution-to-punish-israels-genocide>.
- Network, GBH Forum. 2007. John Mearsheimer and Stephen Walt - The Israel Lobby and US Foreign Policy. Video. <https://www.youtube.com/watch?v=rzXS3tmZrcU>.
- New York Times. 2025. "A Prestigious Law Firm Rescinded Job Offers for Columbia and Harvard Students, but It May Reverse Itself." Online.
<https://www.nytimes.com/2023/10/17/business/davis-polk-employment-columbia-harvard-israel-palestine.html>.
- Alliance, International Holocaust Remembrance. 2025. Working Definition of Antisemitism. United States of America.
<https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism>.
- BBC News. 2025. Trump Dan Netanyahu Menyepakati Rencana Perdamaian Di Gaza – Apa Sikap Indonesia? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8jmk3kn1lvo>.

- Britannica. 2026. Independence Day United States Holiday. Online.
<https://www.britannica.com/topic/Independence-Day-United-States-holiday>.
- CNN News. 2024. "Names and Faces of Harvard Students Linked to an Anti-Israel Statement Were Plastered on Mobile Billboards and Online Sites." Online, October 12.
<https://edition.cnn.com/2023/10/12/business/harvard-doxxing-truck-israel-hamas-statement>.
- Council, Human Rights. 2025. "Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967." Special Procedures United Nations. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-palestine>.
- Davies, Alys. 2024. "All Eyes on Rafah: Di Balik Unggahan Yang Dibagikan Lebih Dari 47 Juta Orang Di Instagram." BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c511kk2r1x0o>.
- Detik News. 2024. Kritik Ke Rektor Columbia AS Karena Demo Pro-Palestina Dibubarkan. April 28.
<https://news.detik.com/internasional/d-7315192/kritik-ke-rektor-columbia-as-karena-demo-pro-palestina-dibubarkan>.
- Detik News. 2025. "DPR AS Kecam Legislator Keturunan Palestina Atas Komentar Soal Israel." Online, January 8.
<https://news.detik.com/internasional/d-7025526/dpr-as-kecam-legislator-keturunan-palestina-atas-komentar-soal-israel>.
- Government, Congress. 2024. H.R.6090 - Antisemitism Awareness Act of 2023. Antisemitism Awareness Act of 2023. United States of America. <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/6090>.
- Government, Congress. 2025. S.558 - Antisemitism Awareness Act of 2025. 119th Congress (2025-2026). United States of America. <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/558>.
- Guardian, The. 2024. Dua Lipa Denounces 'Israeli Genocide' in Instagram Post. May 29. <https://www.theguardian.com/music/article/2024/may/29/dua-lipa-denounces-israeli-genocide-in-instagram-post>.
- Harian Kompas. 2024. Dukung Boikot Israel, Rektor SSU Dibebastugaskan. [youtube.com/watch?v=5WvjlcXOHFk&t=1](https://www.youtube.com/watch?v=5WvjlcXOHFk&t=1).
- Inside Higher. 2026. Trump Admin. Touts 8,000 Student Visas Revoked. January 13. <https://www-insidehighered-com.translate.goog/news/quick-takes/2026/01/13/trump-admin-says-it-revoked-8000-student>.

- Al Saadi, Leen. 2024. "All The Times Bella Hadid Showed Support For Palestine." *Grazia Magazine*.
<https://graziamagazine.com/me/articles/bella-hadid-supported-palestine/>.
- Locke, John. 2025. Ternyata Demokrasi Modern Berasal Dari Pemikiran 3 Tokoh Ini. Nomor 3 Sangat Mengejutkan! Online.
https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8412_ternyata-demokrasi-modern-berasal-dari-pemikiran-3-tokoh-ini-nomor-3-sangat-mengejutkan.
- Metro TV. 2025. Berkumpul Di Depan Gedung Putih, Demonstran Pro-Palestina Kecam Serangan Israel. March 19.
<https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMavo-berkumpul-di-depan-gedung-putih-demonstran-pro-palestina-kecam-serangan-israel>.
- Metro TV. 2026. Gaza Masih Bergolak Meski Fase Kedua Rencana Perdamaian Inisiatif AS Diluncurkan. January 30.
<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCYvPR-gaza-masih-bergolak-meski-fase-kedua-rencana-perdamaian-inisiatif-as-diluncurkan>.
- Moulton, Cyrus. 2024. "Pro-Palestinian Posts Significantly Outnumbered pro-Israeli Posts on TikTok, New Northeastern Research Shows." *World and National News*, May 10. <https://news.northeastern.edu/2024/05/10/israel-hamas-tiktok-research/>.
- Mundi, Amor. 2024. American Jewish Peace Archive: Julie Iny. March 10. <https://hac.bard.edu/amor-mundi/american-jewish-peace-archive-julie-iny-2024-03-10>.
- Nurcholis, Ahmad. 2026. "Pentingnya Melawan Unilateralitas Amerika Serikat." *CNBC Indonesia (Indonesia)*, April 1.
<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20260401163218-14-723280/pentingnya-melawan-unilateralitas-amerika-serikat>.
- Palantir. 2024. Palantir CEO Alex Karp on College Protests and the Future of War | CNBC 2024. Video. <https://www.youtube.com/watch?v=E1schQrqJFU>.
- Parlambang, Athala Hasan. 2025. "Sejarah Kelam Penindasan Kaum Kiri Di Amerika Serikat." *Zona Banten (Indonesia)*, April 8.
<https://doi.org/https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-239221566/mccarthyisme-sejarah-kelam-penindasan-kaum-kiri-di-amerika-serikat>.
- Reuters. 2024a. Polisi Tangkap Ratusan Mahasiswa Pro-Palestina Di New York. <https://www.dw.com/id/polisi-tangkap-ratusan-mahasiswa-pro-palestina-di-new-york/a-68974914>.
- Reuters. 2024b. Pro-Palestinian Encampments at US Universities. Online. May 3. <https://www.swissinfo.ch/eng/pro-palestinian-encampments-at-us-universities/76866097>.

- Suryakusuma, Dhiya Farras. 2025. "Is Democracy in the Room with US ? : Ironi AS Sebagai Negara Demokrasi." Online. HI UI, July 12. <https://ir.fisip.ui.ac.id/is-democracy-in-the-room-with-us-ironi-as-sebagai-negara-demokrasi/>.
- Tempo. 2024. "Rektor Universitas Harvard Mundur, Dampak Perang Israel Hamas." Tempo Internasional, January 3. <https://www.tempo.co/internasional/rektor-universitas-harvard-mundur-dampak-perang-israel-hamas--101979>.
- Tempo News. 2025. Konferensi Perdamaian Gaza. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/konferensi-perdamaian-gaza-2080064>
- United Nations, Human Rights. 2024. Universal Declaration of Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/>.
- US Courts. 2026. Overview - Rule of Law. <https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/overview-rule-law>.
- US Government. 2026. Branches of the U.S. Government. Online. <https://www.usa.gov/branches-of-government>.
- White House, Government. 2026. The White House Washington. Online. <https://www.whitehouse.gov/>.
- Responsible Statecraft. 2026. Senate Again Fails to Block Weapons to Israel. April 15. <https://responsiblestatecraft.org/congress-israel-weapons-sale/>.
- The Guardian. 2023. Ilhan Omar Leads 384 Worldwide Leaders in Call for Gaza Ceasefire. May 24. <https://www.theguardian.com/us-news/2024/jan/11/ilhan-omar-gaza-ceasefire-join-t-letter>.
- The Guardian. 2024. US Senate Rejects Bernie Sanders Effort to Block Arms Sales to Israel. November 21. <https://www.theguardian.com/us-news/2024/nov/20/bernie-sanders-israel-gaza-resolution>
- TrT World. 2023. Rashida Tlaib, Cori Bush, Ilhan Omar and Members of the 'Doctors against Genocide' Group Protest in Front of US Congress. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/C0kttxotcoL/>.
- Younes, Moon. 2026. "STEM Education Under Blockade: Pedagogical Ideals, Material Conditions, and the Systematic Undermining of Scientific Learning in Gaza." Scholasticide in Palestine, April 23. <https://voices.uchicago.edu/scholasticide/>.

- Ramirez House. 2023. Reps. Ramirez, Bush, Tlaib, Carson, Lee Lead Colleagues in Call for Immediate Ceasefire. October 16. <https://ramirez.house.gov/media/press-releases/ reps-ramirez-bush-tlaib-carson-lee-lead-colleagues-call-immediate-ceasefire>.
- US News. 2024. "Canceled Classes, Arrests and Calls for Jewish Students to Go Home: Protests Over Israel-Hamas War Boil Over on Campuses." US News, April 22. <https://www.usnews.com/news/education-news/articles/2024-04-22/canceled-classes-arrests-and-calls-for-jewish-students-to-go-home-protests-over-israel-hamas-war-boil-over-on-campuses>.
- VOA, Indonesia. 2023. DPR AS Putuskan Kecam Tlaib Terkait Retorikanya Tentang Israel-Hamas. November 8. <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-as-putuskan-kecam-tlaib-terkait-retorikanya-tentang-israel-hamas-/7346390.html>.
- VOA, Indonesia. 2024. Aparat Terus Tangkap Demonstran Pro-Palestina Dalam Gelombang Protes Di Kampus-Kampus AS. April 29. <https://www.voaindonesia.com/a/aparat-terus-tangkap-demonstran-pro-palestina-dalam-gelombang-protes-di-kampus-kampus-as/7588994.html>.
- White House, Government. 2026. The White House Washington. Online. <https://www.whitehouse.gov/>.
- Younes, Moon. 2026. "STEM Education Under Blockade: Pedagogical Ideals, Material Conditions, and the Systematic Undermining of Scientific Learning in Gaza." Scholasticide in Palestine, April 23. <https://voices.uchicago.edu/scholasticide/>.
- Khalil, Mahmoud. 2025. "A Letter From Palestinian Activist Mahmoud Khalil." American Civil Liberties Union, March 20. <https://www.aclu.org/news/free-speech/a-letter-from-palestinian-activist-mahmoud-khalil>
- American Library Association. 2026. First Amendment and Censorship. Online. <https://www.ala-org.translate.goog/advocacy/intfreedom/censorship>
- ACLU of Nebraska. 2020. "Freedom Fund." Last modified 2024. <https://www.aclunebraska.org/freedom-fund/>
- Sainato, Michael. 2024. "US professors face discipline and investigations over Palestine support." *The Guardian*, 24 October 2024. <https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/24/university-professors-discipline-palestine-support>.